

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MENJAGA ARAH KEBIJAKAN

Kabinet baru segera terbentuk. Sketsa kebijakan yang telah dirumuskan jadi panduan. Saatnya meneruskan kerja pembangunan sesuai visi jangka panjang Indonesia ke depan.



Daftar Isi



Era pemerintahan kabinet baru semakin dekat. Arah kebijakan pembangunan perlu dijaga dan dipastikan tidak berhenti. Menjaga arah kebijakan pembangunan ini kami gambarkan dengan genggaman erat pada balon udara agar tak mudah terlepas tertiuap angin.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulisty. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantarnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

14 TOPIK PILIHAN

15 TAGAR

LAPORAN UTAMA

17 Rancang Skenario Membangun Indonesia

20 Infografis

22 Menyiapkan Pondasi Keberlanjutan Ekonomi

25 Mendulang Peluang di Tengah Perang

27 Andal Meramu Kebijakan Fiskal

TRIVIA

29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

30 UMi dan Ekonomi Mandiri

FIGUR

34 Panco Membawa Hikmah

OPINI

37 Kenaikan Rating, Daya Saing, dan Optimisme Ekonomi Nasional

OPINI

40 Bencana dan Urgensi Asuransi Kebencanaan

POTRET KANTOR

42 Pemberi Layanan di Garis Terdepan

PROFESI

44 Teduh Mengawal Integritas

REGULASI

46 Ruang Fleksibilitas LMAN dalam Program Strategis Nasional

GENERASI EMAS

48 Kerja Cerdas untuk Negeri

BUGAR

51 Diam-Diam Mematikan

RENUNGAN

52 Bersyukurilah

BUKU

53 *Why Nations Fail: Menelusuri Misteri Ketimpangan Antarneegara*

LOKAL

54 Sepi di Kebun Teh Gambung

FINANSIAL

56 Tips 'Jempol' Debitur 'Pinjol'



Ke Mana 1 Juta Uang Pajak Kita

Apabila ditanya uang pajak kita buat apa saja, maka inilah jawabannya. Setiap 1 juta uang pajak yang kita bayarkan, digunakan untuk berbagai macam hal. Yuk sama-sama simak!

Jangkar Estafet Pembangunan

Dalam pidato visi misi Presiden Jokowi yang dibacakan pada 14 Juli 2019 di Sentul, beliau berharap agar pengeluaran pemerintah melalui APBN dapat tepat sasaran. Beliau menyampaikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN harus dipastikan kembali kepada rakyat dengan memberikan manfaat ekonomi kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam belanja negara pada APBN disusun berdasarkan turunan dari visi misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Seiring dengan visi Presiden Joko Widodo dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka kebijakan fiskal 2020 diarahkan untuk mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM untuk peningkatan produktivitas, serta mendorong upaya akselerasi daya saing untuk penguatan investasi dan ekspor. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk fasilitasi adopsi perkembangan ICT (digitalisasi, e-commerce, internet of things, artificial intelligence, dan AR) serta mendukung transformasi industrialisasi.

APBN tahun 2020 dapat dikatakan istimewa karena penyusunannya



dibuat oleh pemerintahan kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh kabinet baru pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Di sinilah peran penting Pokok-Pokok Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2020 yang akan menjadi titik awal visi misi Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. KEM PPKF 2020 bisa disebut dengan jangkar estafet pembangunan. Pemerintah telah bertekad menjadikan KEM PPKF 2020 sebagai titik tumpu kebulatan tekad untuk mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Untuk dapat mencapai tujuan mulia dalam visi misi tersebut tentu

saja terdapat tantangan dan prasyarat pembangunannya. Tantangan tersebut adalah demografi dengan proporsi jumlah penduduk tua yang semakin besar, masalah urbanisasi, dan pertumbuhan kelas menengah yang semakin meningkat. Selain itu, pembangunan yang telah dilakukan selama ini juga belum mampu membuat Indonesia masuk dalam kategori negara berpenghasilan tinggi atau yang dikenal dengan *middle income trap*.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dan juga menyesuaikan dengan rencana jangka panjang pemerintah, kebijakan makro fiskal 2020 diarahkan tetap ekspansif dan terukur sehingga mampu menstimulasi perekonomian dengan optimal untuk mendukung program prioritas (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan). Hal ini tentu saja dilakukan dengan tetap menjaga risiko fiskal secara terkendali dalam batas aman yang diatur oleh undang-undang. Dengan persetujuan DPR, KEM PPKF 2020 akan digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah dalam penyusunan RUU APBN TA 2020 beserta nota keuangannya.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi



TAX FACTOR

Dalam rangka memperingati Hari Pajak 2019, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan Tax Factor. Ajang unjuk bakat menyanyi yang diadakan setiap tahun ini bertujuan untuk mengapresiasi bakat-bakat seni yang dimiliki para pegawai. Sebanyak 113 peserta mengikuti ajang ini berasal dari semua unit eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJP.

Foto
Argya Diptya
Darpita



Foto
Resha Aditya
Pratama

KELOLA LIMBAH JADI BERKAH

Kota Sabang memiliki kerajinan khas daerah dari pengolahan limbah pohon kelapa. Para pengrajin di kota tersebut mengelola batang pohon kelapa menjadi kerajinan tangan berupa gelas, mangkok, kotak tisu, dan vas bunga. Produk ini sangat digemari oleh wisatawan lokal dan mancanegara sebagai buah tangan dari Sabang.





12/07 Penerapan Cukai Plastik untuk Lingkungan yang Lebih Baik

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan oleh kurang lebih 90 ribu gerai ritel modern di Indonesia setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu alasan pemerintah akan menerapkan cukai kantong plastik. Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen DJBC) Heru Pambudi dalam wawancara pada Senin, (08/07) di kantor pusat DJBC, Jakarta memaparkan mengapa cukai terhadap kantong plastik berbentuk kantong perlu dikenakan. Pertama, isu pencemaran lingkungan di laut tidak hanya mencemari laut namun juga biota laut yang hidup di dalamnya. Kedua, secara kimia, plastik baru bisa terurai hingga 500 tahun meskipun ada yang bisa terurai dalam jangka waktu 2-3 tahun. “Ketiga, sebenarnya masyarakat sudah mulai sadar lingkungan dengan adanya elemen masyarakat yang menyuarakan tidak mau lagi memakai kantong plastik (tetapi) kantong blacu atau dari karung,” tuturnya.

Dirjen DJBC juga mengatakan bahwa tarif cukai plastik akan dipungut pada produsen/pabrik kantong plastik. “Kita kenakan secara spesifik, bukan berdasar harga, per kilo supaya mudah. Dia memproduksi berapa

dikalikan tarif cukai, itulah yang disetor dalam bentuk cukai,” paparnya. Tarif cukai plastik yang diusulkan adalah Rp30.000/kg namun untuk kantong plastik berbahan nabati dapat lebih rendah bahkan dapat dibebaskan sama sekali atau nol karena lebih ramah lingkungan dan bertujuan untuk mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih minim plastik.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan konferensi pers terkait rencana pengenaan cukai kantong plastik, Jumat, (12/07) di Gedung Djuanda I Jakarta. Pengendalian kantong plastik dengan mekanisme cukai dirasa pemerintah lebih tepat untuk diterapkan karena besaran tarif cukai dapat disesuaikan dengan karakter barangnya. Kebijakan ini dinilai efektif untuk pengendalian karena memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol fisik atas kantong plastik itu sendiri. Dengan kata lain, tujuan utama pengenaan cukai kantong plastik ini bukan untuk kebutuhan penerimaan negara. “Kebijakan cukai plastik ini diharapkan bisa sinkron dengan kebijakan pemerintah lainnya yang mendukung *green industry*, misalnya berupa *tax allowance*,” tutup Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal.

28/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Konferensi Pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (PPPK Kemenkeu) menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) atau auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk dimana hal itu mempengaruhi opini laporan auditor independen. Selain itu, KAP dianggap belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, dalam Konferensi Pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (28/06). Penjatuhan sanksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sistem keuangan dan profesi keuangan dalam menjaga kepercayaan publik.



04/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Tutup Program Sinergi DJP, DJBC, dan DJA Tahun 2019

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menutup Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tahun 2019. Menurut Menkeu, sinergi adalah fondasi awal untuk mencapai target penerimaan negara. “Kalau mau melakukan hal yang benar, jalannya akan sepi dan juga berisiko. Untuk itu, jangan jadi pahlawan kesepian. Lakukanlah bersama-sama,” pesan Menkeu pada acara yang bertemakan “Sinergi Tanpa Henti, untuk Indonesia Mandiri” di aula Djuanda, Kamis (04/07). Program yang diusung pada tahun 2017 dilaporkan telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Namun demikian, tidak henti-hentinya Menkeu mengingatkan agar ketiga unit yang bertugas mengamankan penerimaan negara tersebut untuk selalu mengevaluasi kinerja secara lebih detail.

06/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Program Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu

Mengulang sukses program tahun 2018 lalu, Kemenkeu kembali menyelenggarakan Seminggu Bersama Keluarga Kemenkeu (SBKK). Program ini merupakan sebuah program pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia yang melibatkan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan untuk menjadi keluarga asuh. Program SBBK dimulai pada Sabtu, 6 Juli 2019 dan berlangsung selama satu minggu. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa persepsi mengenai kesukuan itu muncul bersamaan dengan *stereotype*. “Mengenal perbedaan adalah *experience*. Toleransi itu tidak hanya untuk diceritakan tapi untuk diterapkan dan dirasakan,” jelas Menkeu. Selama mengikuti program ini, Adik Bineka (sebutan bagi peserta SBBK terpilih) didampingi oleh Kakak Bineka yang berasal dari mahasiswa PKN STAN dan menginap di rumah pejabat Kemenkeu dan dosen PKN STAN, yang berperan sebagai Keluarga Bineka.





08/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Harapan Menkeu Terhadap Eselon II dan III yang Dilantik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 8 (delapan) pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbadaharaan (DJPb) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta 18 (delapan belas) pejabat eselon III di Sekjen dan DJP di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak, Senin (08/07). Menkeu berpesan agar para pejabat Kemenkeu mampu memegang janji setia kepada UUD 1945, menjalankan etika dan perundang-undangan dan menjaga integritas. “Ketiga hal tersebut sangat *simple* namun itu adalah fondasi dalam menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Ini adalah *currency* yang menentukan kredibilitas dari Kemenkeu sebagai bendahara negara, yaitu institusi yang berisi orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi dan profesionalitas,” tuturnya.

11/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Penggunaan SBR007 Untuk Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali meluncurkan penawaran instrumen investasi Saving Bond Retail seri 007 (SBR007) yang bisa dijangkau masyarakat. Dimulai dari Rp1 juta hingga Rp3 miliar, para investor sudah dapat memulai investasinya dengan berbagai keuntungan. Keuntungan SBR007 yaitu aman karena dijamin oleh negara. “Pemerintah menawarkan Saving Bond Retail (SBR)007. Ini diterbitkan Pemerintah. InshaAllah aman. Tidak mungkin ada penundaan pembayaran dan dijamin pemerintah. Tidak mungkin ada gagal bayar atau *default*. SBR007 digunakan untuk pembiayaan pembangunan Indonesia. Dengan SBR007, investor bisa ikut berpartisipasi membangun Indonesia. Ini yang tidak bisa didapatkan di instrumen investasi lain,” jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Luky Alfirman pada Kamis, (11/07) di Jakarta. Selain itu, para investor yang membeli SBR007 juga turut berperan aktif dalam membangun negeri karena dananya akan digunakan untuk pembiayaan uang kita (APBN).

14/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pesan Menkeu Pada Dies Natalis ke-4 PKN STAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan pada mahasiswa di acara puncak Dies Natalis ke-4 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu, (14/07) untuk menjadi teladan bagi Indonesia. “Sikap mahasiswa PKN STAN itu adalah teladan bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Kalian adalah salah satu wajah dari Kementerian Keuangan,” tambah Menkeu. Oleh karena itu, Menkeu berpesan agar mahasiswa PKN STAN menjadi institusi tinggi yang aktif melakukan literasi keuangan di Indonesia. Hal ini didasarkan masih banyaknya mahasiswa atau anak muda Indonesia yang belum tahu tentang keuangan negara. Selanjutnya, Menkeu meminta kepada mahasiswa agar dapat bersatu di tengah perbedaan latar belakang suku, agama, gender, daerah asal, termasuk keterbatasan fisik yang ada.

18/06

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Apresiasi DPR Atas Masukan dan Diterimanya LKPP Tahun 2018

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 yang mendapatkan Opini WTP untuk ketiga kalinya yang dicapai oleh Pemerintah. Opini WTP ini diperoleh berdasarkan penilaian secara profesional dan objektif atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa, (16/07). “Pencapaian opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik,” tegas Menkeu. Pemerintah sependapat dengan pandangan beberapa fraksi untuk terus meningkatkan perhatian dan pembinaan atas Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum memperoleh opini WTP.

16/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Realisasi APBN Semester I 2019 Masih Positif dan Aman

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Realisasi Semester I Tahun 2019 dan Outlook APBN Tahun 2019 pada Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa (16/07). Dalam pemaparannya, Menkeu menyebutkan bahwa meskipun aktivitas riil perekonomian dunia mengalami tekanan pada semester I tahun 2019 dengan meningkatnya ketegangan perang dagang, pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2019 diperkirakan akan tetap positif. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan mencapai 5,3%, meningkat dari realisasi semester I 2018. Hal ini dapat tercapai karena inflasi yang rendah dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu. Tingkat inflasi sampai dengan semester I tahun 2019 mencapai 3,3% (yoy), relatif terjaga pada kisaran target +/- 1%. “Secara keseluruhan, angka inflasi masih akan terkendali di bawah target asumsi APBN 2019. Tetapi Pemerintah tetap perlu waspada kemungkinan tingginya curah hujan dan kenaikan harga ICP (*Indonesian Crude Price*) pada Semester II Tahun 2019,” lanjut Menkeu.



Menyolusi Cukai Plastik

Teks Abdul Aziz

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa konsumsi plastik di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Indonesia menempati urutan tertinggi kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Semenjak diusulkan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI Selasa 2 Juli 2019 lalu, rancangan peraturan tarif cukai untuk mengendalikan konsumsi plastik menjadi topik yang hangat di masyarakat. Kebijakan pengenaan cukai plastik dinilai menjadi cara paling efektif dalam mengendalikan konsumsi plastik dan mengurangi eksternalitas negatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Menkeu, lebih jauh, menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberlakukan tarif cukai terhadap kantong plastik dalam dua bentuk regulasi, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

Menkeu juga memaparkan dua skema pengenaan tarif atas kantong plastik yakni pengenaan cukai sebesar 100 persen terhadap kantong plastik jenis bijih plastik *virgin polyethylene* atau *polypropylene* dengan waktu urai lebih dari 100 tahun dan jenis plastik *oxodegradable*

dengan waktu urai 2-3 tahun. Semakin mudah terurai, plastik akan dikenakan tarif lebih rendah, begitu pun sebaliknya semakin susah diurai akan dikenakan tarif maksimal, yakni Rp200 per lembar atau Rp30.000 per kilogram. Menurutnya, besaran pengenaan tarif cukai plastik tidak akan mengakibatkan inflasi sebab sumbangsih terhadap total inflasi secara keseluruhan sangat kecil, yakni sekitar 0,045 persen.

Senada dengan Menkeu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengungkapkan bahwa tujuan utama pengenaan cukai plastik adalah keseimbangan antara lingkungan dengan industri dan konsumsinya di masyarakat. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif bagi industri atau pelaku usaha yang memproduksi kantong-kantong ramah lingkungan. Insentif diberikan dalam bentuk tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak dipungut cukai. Sementara itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, meyakini instrumen cukai merupakan pilihan paling tepat untuk mengendalikan penggunaan plastik. Menurut data, dari 16 persen sampah di Indonesia yang berupa plastik, 62 persennya terdiri dari kantong plastik.

Rencana pemerintah mengenakan cukai plastik menuai pro dan kontra.

Sektor ritel mengaku tak keberatan. Sementara itu, para pemangku kepentingan di sektor produksi dan Kementerian Perindustrian menyatakan tidak sepakat. Direktur Marketing Indomaret, Wiwiek Yusuf, mengungkapkan penggunaan kantong plastik akan berkurang jika pemerintah menerapkan kebijakan secara simultan.

Wakil Ketua Aprindo, Tutum Rahanta, juga menyambut baik rencana penerapan cukai kantong plastik di tingkat produsen. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, turut berpendapat bahwa penerapan cukai akan menyebabkan motivasi produksi industri hilir berkurang dan menimbulkan sentimen kurang baik bagi investasi bahan baku plastik.

Foto
Anas Nur Huda

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuRI. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

-  www.kemenkeu.go.id
-  [KemenkeuRI](#)
-  [@KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [majalahmediakeuangan](#)



@majalahmediakeuangan Sampaikan secara singkat opini konstruktif Anda terkait pengenaan instrumen cukai sebagai upaya pemerintah menjaga lingkungan dengan mengendalikan penggunaan plastik



Like

Reply



@melaniii19 Plastik adalah jenis sampah yang membutuhkan 50-100 tahun untuk bisa terurai. Kebijakan @beacukai ini nantinya diharapkan dapat meminimalisir jumlah sampah plastik yang ada...



@yusriselamet ...selain itu, hasil cuka juga dapat di-earmark untuk kegiatan yang dapat mengurangi sampah plastik. Contohnya memberikan fasilitas R&D dalam pengurangan sampah plastik



@zakiahfenanda Namun seyogyanya pemerintah perlu mempertimbangkan lagi matang-matang dampak dari kebijakan ini terutama terhadap berbagai industri yang memakai plastik sebagai komoditi utama...contohnya makanan dan minuman yang akan menaikkan harga yang dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat...

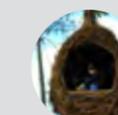


@KemenkeuRI Sampaikan optimisme Anda mengenai arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal Indonesia 2020-2045 menuju visi Indonesia Emas 2045.



Like

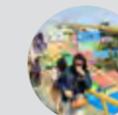
Reply



@SontiPaulina sangat optimis dengan arah KEM PPKF 2020 yang menekankan peningkatan kualitas SDM. SDM adalah investasi jangka panjang yang harus dimulai dari sekarang membenahinya...



@hellogulo Peningkatan mutu SDM inilah yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai peluang bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan bonus demografi..



@desymiranda Dengan bonus demografi Indonesia saat ini, tentu kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi tonggak arah generasi milenial melangkah. Kebijakan harus tepat sasaran dan memiliki dampak yang signifikan...



Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu indikator daya saing negara.

Foto Resha Aditya

RANCANG SKENARIO MEMBANGUN INDONESIA

Siapa pun pemimpinnya, kerja pembangunan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Adanya estafet pemerintahan, bukan berarti menghentikan roda pembangunan yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya. Itu sebabnya, diperlukan jangkar kebijakan yang bisa menjadi fondasi, sekaligus arahan agar siapa pun yang memimpin Indonesia, kerja pembangunan bisa terus berjalan. Melalui mekanisme ini, kelanjutan pembangunan tidak terhenti pada satu periode, tetapi sesuai dengan visi jangka panjangnya.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) menjadi alat yang berperan sebagai jangkar guna memberikan arahan dalam menentukan kebijakan ekonomi tahun-tahun berikutnya. Pemerintah menyusun KEM PPKF setiap tahun sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan wakil rakyat dalam menyusun rancangan APBN. Namun, tahun 2020 menjadi tahun istimewa dalam penyusunan KEM PPKF.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara melalui wawancara kepada Media Keuangan beberapa waktu lalu. “Pertama, visi Indonesia 2045 menjadi *background* penyusunan KEM PPKF 2020 ini,” ungkapnya. Selain itu, tahun 2020 juga menjadi

tahun pertama dari periode kedua presiden terpilih, serta tahun pertama dari pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menuju seratus tahun kemerdekaan

Visi Indonesia Emas pada 2045 mendatang menjadi acuan jangka panjang dalam penyusunan KEM PPKF 2020. Pada momen seratus tahun Indonesia merdeka tersebut, pemerintah telah memetakan sejumlah capaian yang ingin diraih. Pada masa itu, kelas menengah Indonesia diperkirakan mencapai 70 persen dari total penduduk yang mencapai 319 juta jiwa. Usia produktif di Indonesia diperkirakan mencapai 47 persen. Sementara pendapatan per kapita tiap penduduk diprediksi mencapai lebih dari USD23 ribu.

Pembangunan dilaksanakan berkelanjutan untuk jangka panjang

Foto Anas Nur Huda



Salah satu syarat untuk menjadi negara maju pada 2045 adalah memiliki tata ruang wilayah yang dikelola dengan baik serta didukung sistem yang integratif

Foto Cahyo Afif

Pada sisi ekonomi, Indonesia di masa itu diprediksi menempati posisi kelima terbesar di dunia. Hal ini dengan memperhatikan struktur ekonomi Indonesia yang bergeser menjadi sektor bernilai tambah tinggi. Bahkan, porsi kue ekonomi sebesar 73 persennya berasal dari sektor jasa.

KEM PPKF 2020 juga menyebutkan, terdapat sedikitnya enam syarat yang perlu dipenuhi Indonesia, agar bisa menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Pertama, perlunya infrastruktur layak sebagai penyokong mobilitas dan pendorong pembangunan. Kedua, penguatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan maupun riset, kesehatan, serta perlindungan sosial. Ketiga, pengayaan inovasi dan teknologi guna menjawab tantangan industri ke depan. Keempat, dimilikinya birokrasi pemerintah yang berkualitas dan efisien terhadap proses bisnis. Kelima, tata ruang wilayah yang dikelola dengan baik serta didukung sistem yang integratif. Kemudian keenam, terwujudnya APBN yang sehat sebagai sumber daya ekonomi dan keuangan.

Menanggapi hal ini, pakar ekonomi Eric Sugandi menyampaikan, dalam

menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu mempersiapkan beberapa hal penting. Selain peningkatan pada kualitas SDM, infrastruktur, hukum, serta birokrasi, diperlukan juga peningkatan pada daya dukung lingkungan. “(Tujuannya, agar pembangunan bisa berkesinambungan dijalankan,” jelasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Eric menyoroiti perlunya sikap kehati-hatian pemerintah, sehingga tidak membebani keuangan negara.

Fokus pada SDM

Upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 menjadi fokus kebijakan fiskal. Hal ini tercermin pada tema kebijakan fiskal 2020, yaitu “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tema tersebut juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, yaitu “Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Terkait hal itu, Eric Sugandi menuturkan, “Kalau dilihat dari Global Competitiveness Index (GCI) oleh World Economic Forum, (maka) daya saing Indonesia *trend*-nya membaik.”

Meski demikian, Eric menggarisbawahi rendahnya posisi Indonesia di antara negara ASEAN lain. Selain itu, skor Indonesia untuk komponen kapabilitas inovasi dan keterampilan pada GCI juga masih rendah. “Kedua komponen ini berkaitan erat dengan pengembangan SDM,” katanya.

Itu sebabnya, selain berfokus pada pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga berupaya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan andal, serta menguasai teknologi. Sementara untuk inovasi, alokasi dana abadi riset dan insentif yang diberikan pemerintah jadi alternatif guna mendorong penemuan dan inovasi.

APBN sehat kredibel

Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan APBN yang sehat. Upaya ini tercermin pada optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas, serta pembiayaan kreatif. Mobilisasi pendapatan dilakukan melalui reformasi pada perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, insentif fiskal masih tetap diberikan guna menarik investasi.

Selanjutnya, peningkatan kualitas

belanja dilakukan dengan menerapkan konsep *value for money*. Kualitas belanja dinilai tidak cukup dengan merealokasi belanja konsumtif menjadi produktif, tetapi juga melalui penghematan belanja barang, peningkatan belanja modal, penguatan belanja reformasi birokrasi, serta sinergi belanja subsidi dan bansos yang tepat sasaran. Sementara itu, pembiayaan kreatif terus dikembangkan dengan memperhatikan risiko agar defisit dan utang tetap terkendali. Pada sisi lain, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah. Perbaikan ditandai dengan peningkatan pada aset dan ekuitas, serta terkendalinya liabilitas.

Terus mereformasi institusi

Reformasi birokrasi jadi catatan penting yang perlu dilakukan dalam pencapaian visi Indonesia 2045. Suahasil menyebutkan, meski birokrasi memegang porsi 15 persen dari total aktivitas ekonomi Indonesia, tetapi dampak dari perilaku birokrasi akan berpengaruh pada 85 persen pelaku ekonomi. Dia merinci, sebanyak 85 persen pelaku ekonomi terdiri dari masyarakat yang melakukan aktivitas konsumsi, masyarakat pelaku ekspor-impor, serta masyarakat yang melakukan aktivitas investasi. Semuanya sangat terpengaruh dengan kebijakan yang dibuat birokrasi. “Mereka (birokrasi) yang menjaga 15 persen, tapi apapun yang dikerjakan berpengaruh kepada yang 85 persen (masyarakat). Karena itu, birokrasinya mesti benar. Kita pakai istilahnya Reformasi Birokrasi,” jelasnya.

Perumusan asumsi

Dalam menyusun KEM PPKF 2020, pemerintah memperhatikan kondisi perekonomian global yang

telah, sedang, dan akan terjadi. Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), dalam kurun 2019-2024 pertumbuhan ekonomi global hanya akan berada di kisaran 3,6-3,7 persen. Faktor yang menghambat pertumbuhan global tersebut diantaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi negara maju, serta tingkat pertumbuhan negara berkembang yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Meski demikian, pada 2020 KEM PPKF mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,3-5,6 persen dengan inflasi di kisaran 2,0-4,0 persen.

Senada dengan prediksi pemerintah, Eric Sugandi memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,3 persen pada 2020. “Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga masih merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung oleh investasi dan kinerja ekspor yang akan mulai pulih,” jelasnya. Eric menambahkan, jika ekonomi dunia tumbuh lebih cepat di tahun depan, maka kinerja ekspor Indonesia, dari sisi peningkatan volume permintaan maupun harga, bisa membaik. “Nilai tukar rupiah yang *undervalued* juga bisa membantu kinerja ekspor Indonesia tahun depan,” ungkapnya.

Pada kesempatan lain, pakar ekonomi INDEF, Bhima Yudhistira menuturkan, asumsi makro yang ditetapkan pemerintah pada 2020 dinilai lebih realistis. “(Hal ini) dengan melihat perkembangan tantangan eksternal, baik dari perlambatan ekonomi global, perang dagang, maupun resiko geopolitik yang meningkat,” ungkapnya. Di sisi lain, akibat tekanan eksternal baik ekspor, investasi maupun konsumsi rumah tangga, dinilai rentan terdampak perlambatan di 2020. “Motor utama ekonomi Indonesia

pada 2020 akan makin bergeser ke arah *domestic consumption* serta *domestic investment* (PMDN),” sebutnya.

Perang dagang

Perlambatan yang terjadi pada perekonomian global salah satunya juga disebabkan oleh perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Gejolak perekonomian tersebut, mau tidak mau, memberikan tantangan terhadap perekonomian domestik secara langsung. Menanggapi hal ini, Eric Sugandi menyampaikan, selain berpengaruh negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia, perang dagang juga berpengaruh positif dalam membuka peluang bagi beberapa industri.

Eric menilai, perang dagang lebih sebagai instrumen diplomasi ekonomi pemerintahan AS di bawah pemerintahan Presiden Trump dan bukan merupakan kebijakan yang *rigid*. “Artinya, pintu untuk negosiasi dengan negara-negara yang menjadi target AS sebenarnya masih terbuka,” ungkapnya.

Eric menambahkan, peluang Indonesia dalam kondisi perang dagang adalah untuk mengisi slot impor AS yang tadinya dikuasai Tiongkok. Meski demikian, Eric memperingatkan adanya persaingan yang cukup ketat antarnegara berkembang lainnya dalam mengisi peluang tersebut.

“Perusahaan Indonesia menghadapi kompetisi yang berat dari negara-negara berkembang di Asia lainnya, misalnya Kamboja dan Bangladesh, di tekstil dan garmen. (Sementara), Indonesia masih sulit menghasilkan produk-produk elektronik untuk segmen elektronik yang *high tech*, karena butuh modal yang lebih besar dan SDM yang lebih kompetitif,” ungkapnya memperingatkan.

Terkait perang dagang, Bhima Yudhistira meyakini perlunya insentif fiskal yang diberikan pemerintah guna mengambil peluang relokasi industri dari Tiongkok dan AS ke Indonesia. “Kuncinya adalah insentif fiskal yang lebih sesuai kebutuhan calon perusahaan yang akan relokasi industri, jadi sifatnya jempot bola bukan insentif umum. Meskipun hasilnya baru akan terlihat pada 3-5 tahun ke depan,” katanya. Bhima juga menyoroiti pentingnya memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara nontradisional yang selama ini memiliki surplus perdagangan dengan Indonesia. Termasuk juga, memberikan keringanan pajak kepada sektor-sektor yang terdampak perang dagang.

Teks Farida Rosadi

Melanjutkan Kebijakan Fiskal

APBN tahun 2020 menjadi istimewa karena penyusunannya dibuat oleh pemerintahan kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh kabinet baru pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Di sinilah peran penting Pokok-Pokok Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2020 yang akan menjadi titik awal visi misi Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Dengan mengusung tema "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM", KEM PPKF 2020 bisa disebut dengan jangkar estafet pembangunan.

Ringkasan Ekonomi Makro 2019 dan Proyeksi 2020



Strategi Makro Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2024

1 Penguatan Belanja yang Berkualitas

- Penguatan kualitas SDM (produktivitas dan inovasi)
- Percepatan pembangunan infrastruktur (produktivitas dan daya saing)
- Peningkatan efektivitas perlindungan sosial dan subsidi
- Penguatan desentralisasi fiskal
- Penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian reformasi institusional
- Peningkatan investasi dan ekspor

2 Pelebaran Fiscal Space

- Peningkatan tax ratio
- Pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing dan inovasi
- Pengelolaan aset yang optimal
- Peningkatan efisiensi belanja
- Pengembangan pembiayaan kreatif & inovatif
- Pendalaman pasar keuangan
- Peningkatan investasi dan ekspor

3 Pengendalian Risiko APBN sehat berkelanjutan

- Pengendalian defisit dan rasio utang
- Keseimbangan primer menuju positif
- Memperkuat ketahanan fiskal

*Sumber dokumen KEM PPKF 2020





Salah satu fokus utama kebijakan fiskal 2020 adalah SDM yang berkualitas

Foto Resha Aditya

MENYIAPKAN FONDASI KEBERLANJUTAN EKONOMI

Siang itu, kompleks parlemen terasa cukup panas. Gedung Paripurna menjadi saksi bisu kala sang Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pengantar dan keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020. Pidato Menkeu disampaikan di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Paripurna DPR RI ke-17 dengan total peserta lebih dari 280 orang pada akhir Mei lalu.

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintahan terpilih dalam Pemilu 2019 akan menyusun landasan RPJMN lima tahunan ke depan sebagai kerangka pembangunan nasional. KEM PPKF tahun 2020 menjadi salah satu dokumen yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang sekaligus menjadi awal dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini, pemerintah berniat menjadikan KEM PPKF tahun 2020 sebagai titik tumpu kebulatan tekad dalam mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka atau visi Indonesia 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

“Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan, dan risiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen, inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,0-5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp14.000-15.000 per USD, harga minyak mentah Indonesia USD60-70 per barel, *lifting* minyak bumi 695-840 ribu barel per hari, dan *lifting* gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari,” jelas Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR.

Kondisi makro

Mendukung penjelasan Menkeu, Kepala Pusat Kebijakan

Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adriyanto, mengungkapkan setelah melambat di 2019, perekonomian global diprediksi membaik di tahun 2020 yang utamanya ditopang oleh negara berkembang, India dan Asean. Sementara negara maju tetap diprediksi melambat.

“Walaupun perekonomian global dan volume perdagangan membaik, proyeksi harga komoditas cenderung tetap rendah dibayangi oleh produksi minyak global yang meningkat serta isu lingkungan yang dapat mempengaruhi permintaan akan batu bara dan CPO,” jelasnya.

Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global. Ketidakpastian ekonomi global memberikan dampak terhadap ekonomi domestik. Namun, dengan modal kuat fundamental ekonomi Indonesia, Adriyanto yakin perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh kuat dan sehat. Pertumbuhan ekonomi 2020 diprediksi sekitar 5,2 persen – 5,9 persen yang ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, dan ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2020 didorong oleh sektor manufaktur, perdagangan, serta jasa yang terkait ekonomi digital dan pariwisata.

Senada dengan Adiyanto, Vice President-Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 dan menyongsong tahun 2020 diperkirakan masih akan diliputi risiko ketidakpastian dari perlambatan pertumbuhan global, isu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, kebijakan

proteksionisme serta volatilitas harga komoditas global. Eskalasi ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok sejak tahun 2018 berdampak pada penurunan volume perdagangan global yang diikuti oleh perlambatan aktivitas ekonomi di negara maju.

Di tengah ekspektasi perlambatan ekonomi global serta Tiongkok pada tahun 2019, perekonomian domestik diperkirakan akan tetap solid dan stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga serta iklim investasi yang terus membaik seiring dengan deregulasi paket kebijakan.

“Dalam mengantisipasi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju dan Tiongkok, bauran kebijakan fiskal, moneter dan reformasi struktural diharapkan dapat mendukung momentum pertumbuhan ekonomi domestik,” jelas Josua.

Penguatan pondasi ekonomi

Dengan berakhirnya RPJMN lima tahunan 2015-2019, kerangka pembangunan nasional lima tahunan yang baru pun dibentuk. Untuk menyiapkannya dengan matang, Josua mengusulkan agar pada 2020 mendatang, koordinasi tepat terkait kebijakan fiskal menjadi hal yang strategis demi mencegah dampak perang dagang ke dalam negeri. Koordinasi ini dibutuhkan mengingat dampak perang dagang yang cenderung mengarah ke sektor riil sehingga arahan kebijakan fiskal Indonesia harus cukup jelas. Arahan ini sendiri secara jangka menengah nantinya akan termaktub dalam RPJMN Indonesia 2020-2024.

“Dibutuhkan kerangka tahunan demi tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek. Di sinilah peran dari KEM PPKF, dalam mengoordinasi tujuan RPJMN serta stabilitas ekonomi nasional,” paparnya.

Menambahkan hal tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF, Hidayat Amir, menjelaskan KEM PPKF 2020 berisi gambaran perekonomian Indonesia di tahun 2020 dengan melihat perkembangan ekonomi tahun sebelumnya dan *update* terkini perkembangan domestik dan global. Selain itu, KEM PPKF juga berisi visi dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam rangka mendukung visi dan rencana pembangunan yang sudah dituangkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Di dalam dokumen KEM PPKF 2020 dipaparkan perkiraan awal dari ekonomi makro dan fiskal

Indonesia. Selain itu, dalam KEM PPKF dipaparkan arah dan strategi kebijakan makro fiskal, baik dalam perspektif jangka menengah ataupun spesifik untuk tahun 2020. Hal ini tentu saja mempunyai peranan penting dalam menentukan besaran pendapatan, alokasi belanja dan rencana pembiayaan dalam RAPBN 2020.

“Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen KEM PPKF ini merupakan dokumen rencana kebijakan ekonomi dan fiskal 2020 yang menjadi awal dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan menjadi panduan dan arah Pemerintah dalam menyusun APBN 2020,” jelasnya.

Kebijakan fiskal 2020

Amir juga menuturkan bahwa tema kebijakan fiskal 2020 adalah ‘APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM’. Tema ini menyiratkan pada tahun 2020, Indonesia ingin terus memperbaiki daya saing ekonomi dengan memperkuat produktivitas nasional melalui peningkatan kualitas SDM, riset dan pengembangan. Hal ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk membuat ekonomi Indonesia lebih besar lagi.

“Produktivitas yang menjadi kunci penting meningkatnya *supply side economy* harus ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas faktor-faktor produksinya,” jelasnya.

Lebh jauh, Amir memaparkan terdapat lima fokus utama dalam kebijakan fiskal 2020. Pertama, SDM yang berkualitas untuk produktivitas dan inovasi. Dalam fokus kebijakan ini, APBN diharapkan dapat mendukung pembangunan manusia Indonesia yang lebih baik yaitu lebih sehat, lebih terampil (*skillfull*), lebih inovatif dan berintegritas, dan lebih sejahtera.

Kedua adalah akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi. Fokus kebijakan ini memberikan arah bagi APBN agar nantinya dapat digunakan untuk mendukung proses transformasi industrialisasi dan mengatasi masalah sosial yang timbul dari transformasi ekonomi tersebut.

Ketiga, desentralisasi fiskal yang berkualitas. Fokus kebijakan ini memberikan arah untuk penguatan peranan fiskal di level daerah. Ke depan diharapkan daerah bisa memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat *mandatory spending*.

Keempat, birokrasi yang efisien dan efektif merupakan bagian dari *institutional reform*. Fokus

kebijakan ini mendorong agar APBN mendukung pelaksanaan reformasi institusi dalam rangka mendorong produktivitas dan integritas aparatur negara. Yang terakhir adalah antisipasi ketidakpastian. Fokus kebijakan ini ditujukan agar APBN nantinya dapat memitigasi risiko bencana dan penguatan *fiscal buffer* untuk fleksibilitas APBN.

Mendukung kelima fokus kebijakan di atas, Amir menjelaskan tiga strategi utama menjalankan kebijakan fiskal 2020. Yang pertama adalah memobilisasi pendapatan yang inovatif. Hal ini berarti pemerintah akan berusaha meningkatkan pendapatan negara sebagai sumber pendapatan negara namun tanpa mengorbankan iklim dunia usaha dan investasi. Insentif fiskal tetap diberikan untuk mendukung daya saing dan ekspor. Selain itu PNBP akan dioptimalkan dengan cara lebih baik yaitu optimalisasi pengelolaan SDA dan aset negara.

Kedua, strategi belanja yang efektif. Belanja efektif berarti membiayai program-program kegiatan yang benar-benar memberikan hasil dan dampak optimal bagi tujuan dan fokus utama pembangunan di tahun 2020. Belanja akan didorong untuk mendukung penguatan SDM melalui program vokasional, *link and match* dan penguasaan ICT. Program perlindungan sosial dibuat komprehensif, subsidi dijaga agar tepat sasaran, dan belanja infrastruktur diarahkan untuk mendukung proses transformasi industri.

“Ketiga, pembiayaan yang kreatif. Peran swasta dalam mendukung pembiayaan semakin diperkuat untuk mendapatkan

sumber pendanaan pembiayaan yang lebih murah dan beragam,” pungkasnya.

Tantangan 2020

Mendekati akhir tahun 2019, Ekonom Bank Permata, Josua, juga mengingatkan terkait tantangan yang perlu diwaspadai pada 2020. Dalam rangka mengantisipasi tantangan ekonomi 2020, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan kualitas fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, tantangan perekonomian Indonesia dalam lima tahun mendatang masih akan muncul dari domestik dan eksternal.

Dari internal, upaya perbaikan defisit transaksi berjalan secara struktural perlu dilanjutkan mengingat isu perang dagang dan kebijakan proteksionisme pada perekonomian global akan menghambat kinerja ekspor. Selain itu, upaya peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas nasional perlu terus dilakukan agar daya saing industri nasional meningkat yang selanjutnya akan mendorong peningkatan konsumsi domestik dan investasi ke dalam negeri.

Selain itu, peningkatan kerja sama ekonomi internasional perlu menjadi prioritas pemerintah dalam rangka mendorong investasi dan mendorong kinerja ekspor dalam lima tahun mendatang. Yang terakhir, reformasi struktural, deregulasi kebijakan ekonomi dan percepatan perizinan harus dilakukan secara berkelanjutan agar iklim investasi Indonesia terus meningkat yang akan menentukan kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

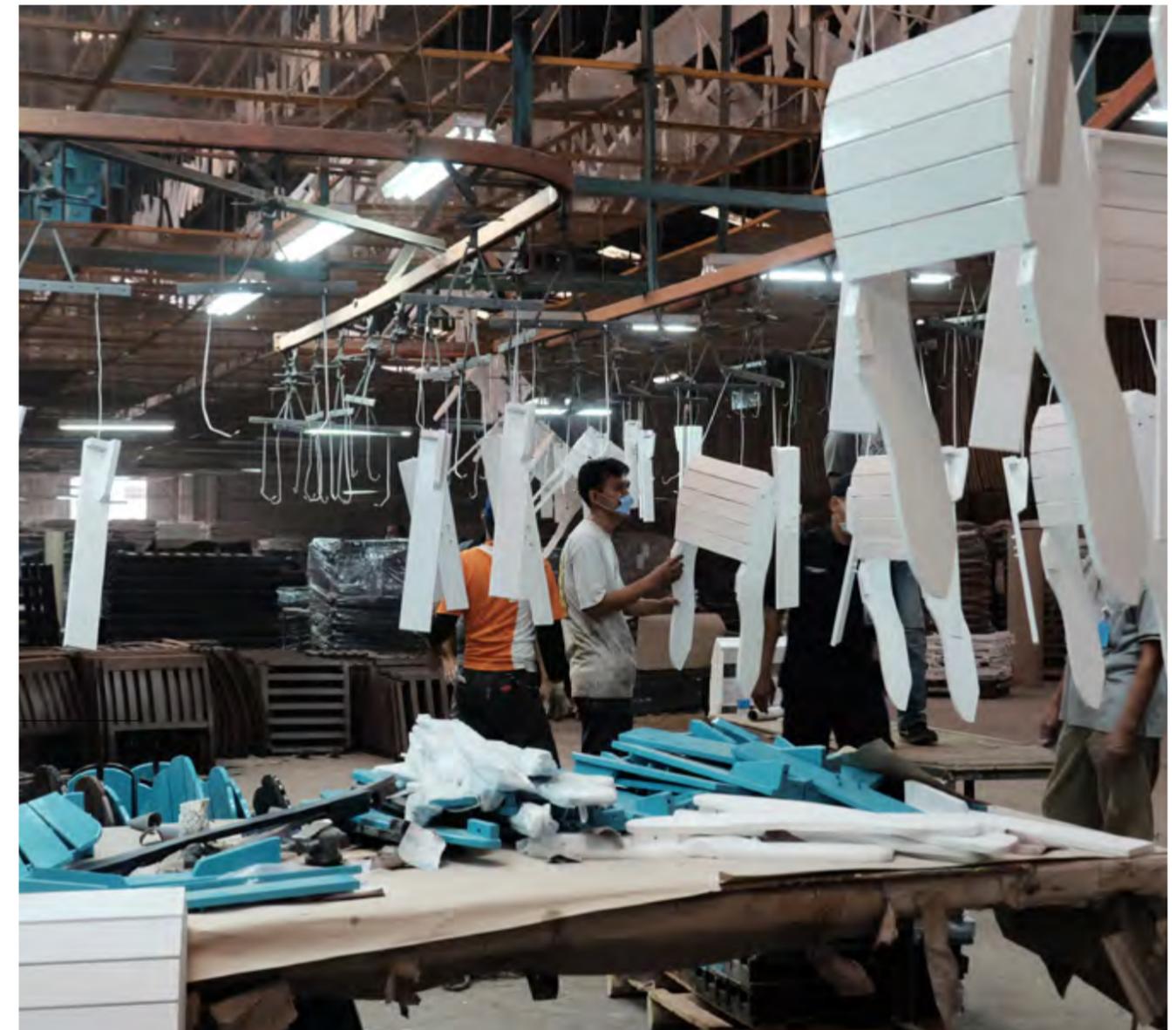
Teks Abdul Aziz

MENDULANG PELUANG DI TENGAH PERANG

Bak dua sisi mata uang, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina membawa musibah sekaligus berkah bagi perekonomian Indonesia. Adu kenaikan tarif menciptakan risiko penurunan perdagangan global yang mau tak mau akan mengganggu pertumbuhan ekonomi domestik. Di sisi lain, momentum ini juga dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor di sejumlah sektor unggulan. Industri tekstil

Industri mebel bisa mengambil peluang pasar ekspor di perang dagang.

Foto Resha Aditya Pratama





“Di luar negeri sudah banyak model baru untuk membiayai investasi dan ekspor, misalnya penggunaan *Letter of Credit* sebagai jaminan.”

Benny Soetrisno
Ketua Apindo Bidang
Perdagangan

digadang-gadang menjadi salah satu yang mampu mendulang peluang di tengah perang. Namun, lemahnya daya saing dan produktivitas dalam negeri dianggap menjadi penunda keberhasilan menyambar kesempatan.

Efisien menjadi kunci

“Kata kunci keberhasilan di dalam persaingan global adalah efisien,” tegas Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat. Menurutnya, pelaku industri dan pemerintah harus sama-sama berperilaku efisien. Ia optimis Indonesia mampu memenangkan persaingan jika pelaku industri memiliki teknologi dan manajemen efisien, serta pemerintah menerapkan pelayanan publik efisien.

Ade mengapresiasi masifnya pembangunan infrastruktur lima tahun terakhir yang berdampak pada membaiknya ekosistem industri. “Secara logistik, barang sudah lebih mudah dan lebih

murah,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dalam jangka waktu dekat dapat membangun *central database* yang kukuh. Ade berpendapat hal tersebut menjadikan pemerintah lebih efisien dalam merancang kebijakan.

Salah satu terobosan yang dilakukan API agar bisa meningkatkan daya saing dan produktivitas industri tekstil dalam negeri yakni bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian membuka Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Solo, Jawa Tengah. “Jadi, inilah akselerasi yang kita lakukan. Selain *training* untuk operator selama 28 hari, kami juga menyelenggarakan program Diploma I, II, III, dan IV,” tutur Ade. Selain itu, sebagai upaya mengambil peluang ekspor di tengah kecamuk perang dagang, Ade mengaku telah melakukan perundingan dengan United States Trade Representative (USTR) difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan dan Kedutaan Besar Indonesia di Washington.

Perlu inovasi pembiayaan

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengungkapkan perang dagang AS-Tiongkok telah terasa dampaknya ke Indonesia berupa kenaikan permintaan. Menurut Benny, kenaikan permintaan tentu harus diimbangi dengan kenaikan kapasitas produksi. Sementara itu, kenaikan kapasitas produksi berhubungan erat dengan pembiayaan. Namun, ia menilai saat ini model pembiayaan ekspor di Indonesia masih kurang inovatif. “Di luar negeri sudah banyak model baru untuk

membiayai investasi dan ekspor, misalnya penggunaan *Letter of Credit* sebagai jaminan,” tambahnya.

Sebagai strategi menyikapi perang dagang, Apindo telah memetakan produk-produk Tiongkok apa saja yang dikenakan kenaikan bea masuk ke Amerika, dan sebaliknya. Selain tekstil, industri yang dapat turut memanfaatkan kans kenaikan ekspor ialah sepatu, elektronik, *furniture*, dan *spare part* otomotif. Akan tetapi, persaingan merebut pangsa pasar cukup ketat. Benny mengatakan sejumlah faktor menyebabkan Indonesia kurang berdaya saing. Sebut saja dengan negara Vietnam, upah tenaga kerja Indonesia cukup tinggi, tetapi penggunaan energi lebih boros dan jam kerja lebih rendah dibanding negara tersebut.

Guna memperkuat struktur industri dalam negeri dan memberi peluang ekspor baru, Benny berharap proses hilirisasi industri dapat dipercepat. Mengambil contoh sumber daya kayu, ia mengatakan peningkatan ekspor dapat dicapai melalui program hilirisasi kayu dalam wujud industri mebel dan kertas. “Kalau kayu dijadikan sumber, *sustainability*-nya lebih baik dibandingkan dengan tambang batu bara atau emas,” ujar Benny. Ia pun berharap pemerintah dapat konsisten menerapkan digitalisasi di berbagai bidang sebagai terobosan hadapi persaingan global.

APBN akselerasi daya saing

Berdasarkan data Global Competitiveness Index tahun 2018 yang diterbitkan World Economic Forum, posisi daya saing Indonesia di peringkat 45, masih lebih rendah dibanding Singapura (2), Malaysia (25), dan Thailand (38). Pemerintah menyadari perlunya segera memperkuat fondasi, terutama pada sektor infrastruktur, kualitas SDM, kemampuan berinovasi dan adaptasi teknologi, serta sistem keuangan. Untuk itu, kebijakan APBN 2020 diarahkan menuju ke sana.

APBN 2020 disusun untuk mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun (KEM PPKF) 2020 yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Dengan makin kuatnya daya saing, ekonomi Indonesia diyakini mampu kembali tumbuh di atas 6 persen, sekaligus membawa Indonesia keluar dari jebakan *middle income trap*, dan mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara maju.

Teks Reni Saptati D.I.

ANDAL MERAMU KEBIJAKAN FISKAL



Suahasil
Nazara,
Kepala Badan
Kebijakan
Fiskal

Foto
Anas Nur
Huda

Pemerintah baru saja menyampaikan KEM PPKF 2020 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020. Lalu, hal apa yang menjadi perhatian pemerintah dalam meramu pondasi awal kebijakan fiskal di tengah tantangan perekonomian global saat ini? Simak wawancara Media Keuangan bersama Kepala Badan kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, berikut.

Hal apa yang berbeda dari KEM PPKF 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?

Visi Indonesia 2045 menjadi *background* penyusunan KEM PPKF 2020. Ini sebagai tujuan besar jangka panjangnya. Jadi kalau kita bikin untuk 2020 kita tidak boleh lepas dari misi besarnya, jangka panjangnya,

yaitu 25 tahun ke depan. Di dalam KEM PPKF kali ini kita melihat Indonesia dalam jangka panjang sebagai *background*, apa sih yang kita inginkan 25 tahun ke depan? Indonesia di 2045.

Beda utama KEM PPKF 2020 ini menjadi tahun pertama dari pemerintahan terpilih, serta tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024. (Maka), lima tahun ke depan, di masa pemerintahan yang kedua ini mau ngapain? Apa targetnya? Apa yang menjadi pola pikirnya? Apa visinya? Nah itu yang kita coba tangkap dalam merumuskan ini. Kita juga ramu dari periode kampanye Pilpres kedua calon Presiden, arah-arah itu semuanya kita tangkap dari perdebatan selama kampanye, serta perdebatan selama ini yang dilakukan kelompok ekonom, teknokratis, pengamat, pada

ngomong apa. Itu kita coba tangkap.

Mengapa reformasi institusi perlu dimasukkan dalam pembahasan KEM PPKF?

Semua cita-cita kita tadi menuju Indonesia Emas. Selanjutnya, yang menjalankan kebijakan itu kan birokrasi. Salah satu pelakunya pemerintah (meski bukan satu-satunya). Contohnya, PDB kita itu sekitar Rp15.000 triliun. APBN itu sekitar Rp2.400 triliun. (Maka), APBN seperenam (atau 15 persen) dari PDB.

Katakanlah 15 persen PDB itu dari APBN. (Sementara) 85 persen nya itu siapa? Ya, dunia usaha, masyarakat, investor, eksportir, importir. Jadi APBN bukan mayoritasnya PDB. Namun, yang 85 persen masyarakat itu, semua itu, sangat terpengaruh dengan kebijakan yang dibuat oleh yang menajagai yang 15 persen ini (pemerintah). Ya toh?

Karena itu, yang menjaga 15 persen ini, mesti benar menjaganya. Siapa? Birokrasi, baik di Kementerian Keuangan, di Kementerian Teknis, termasuk birokrasi di Daerah. Sebab itu, birokrasinya mesti benar. Kita pakai istilahnya Reformasi Birokrasi. Nah, reformasi terhadap birokrasi ini menjadi sangat penting agar kualitasnya tambah bagus. Sebab dia menjadi *on going activity*. It's a *continuous effort*.

Dalam beberapa kesempatan, disebutkan pemerintah melakukan upaya mobilisasi pendapatan, belanja yang lebih baik, serta pembiayaan kreatif. Bagaimana arahnya?

Dalam agenda kita punya impian 25 tahun. Lalu, kita pecah lima tahun ke depan, dan tahun depan seperti apa. Maka kita punya daftar belanjaan. Seperti dalam mengurus rumah tangga, maka daftar belanjaan ini biasanya banyak sekali. Begitupun dalam perspektif 25 Tahun Indonesia Emas. Itu membutuhkan uang banyak. Maka, pemerintah melakukan peningkatan kualitas belanja yang efektif dan efisien untuk mendukung program prioritas pembangunan. Selanjutnya dari daftar belanja ini, maka (sumbernya) nomor satu dari Penerimaan Negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dengan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Mobilisasi pendapatan dilakukan melalui reformasi perpajakan, PNBPN, hingga insentif fiskal.

APBN menghadapi situasi belanja ingin banyak, tapi penerimaan terbatas. Maka, keputusan berutang mesti keputusan bersama antara pemerintah dengan masyarakat yang diwakili oleh DPR. Bahasa kerennya pembiayaan. Selanjutnya kita berutang tapi inovatif, melalui Green Financing, SDG Financing, atau Blue

Financing. Pembiayaan kreatif jadi strategi pemerintah mengendalikan defisit dan risiko APBN. Artinya pemerintah tidak ingin bergantung pada instrumen pembiayaan tertentu dalam mendanai defisit APBN. Apapun jenis *financing*-nya, tiap tahun kita komunikasikan. Kemudian pengelolaannya kita jaga dalam batas aman.

Pengaruh apa yang perlu diwaspadai dalam perang dagang AS-China terhadap Indonesia?

Jadi, perang dagang Amerika dan China ini menjadi suatu *concern* besar. Kenapa? Karena (yang berperang) ini negara terbesar pertama dan kedua. Maka, (negara) kecil ini pasti kena pengaruh. Salah satu pengaruh utama adalah kita banyak mengekspor ke China dan ke AS. Kalau dampak perang ini mengurangi pertumbuhan ekonomi mereka, maka permintaan mereka atas barang-barang Indonesia juga akan turun. Ini menjadi suatu yang *continous*. Maka, seberapa kita bisa menggantungkan pertumbuhan kita kepada sumber pertumbuhan ekspor?

Kedua, kalau kondisi perang dagang, kira-kira uang yang ada di dunia ini akan berubah dengan cara pikirnya seperti apa? Kalau Amerika mengatakan, *Saya mau American First. Saya akan membuat kebijakan sehingga negara lain deal sama saya*. Artinya bisa jadi macam-macam. Salah satu yang kita waspada adalah, apakah seluruh modal di dunia itu akan lari kembali ke Amerika? Kalau iya, berarti yang tersisa buat *the rest of the world* itu menjadi lebih sedikit. Padahal kita butuh uang itu untuk masuk ke sini karena kemampuan di dalam negeri terbatas.

Akibatnya apa? Kita tidak bisa membangun lebih cepat. (Lalu),

dollar menjadi agak terbatas.

Kalau dolarnya menurun karena ekspornya menurun, uang dari portfolio internasional tidak masuk ke Indonesia, sehingga dollarnya di sini menipis. Akibatnya, harga dollar akan naik terhadap rupiah dan terdepresiasi. Sebab, jika *demand*-nya itu tinggi harga pasti naik. Nah, disinilah kita *manage* itu dengan berbagai macam kebijakan. Kalau tidak kita *manage*, maka kita bisa jadi sangat rentan.

Bagaimana peluang Indonesia dalam kondisi perang dagang ini?

Satu dimensi perang dagang AS dan China adalah AS sedang menaruh tarif besar kepada China. Maka bisa jadi, perusahaan-perusahaan yang tadinya di China akan berpikir, "*Saya terus keluar saja dari China. Saya pergi ke negara lain saja deh yang tidak berantem sama Amerika*." Begitu kan? Ini yang berusaha ditangkap. Tapi kita menangkap itu, artinya kita bersaing dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Taiwan, serta negara-negara di sekitar. Dalam bersaing itu, kita perlu untuk melihat dan introspeksi. Apakah Indonesia cukup diminati atau tidak? Di situ kita banyak melakukan *review* dari sisi stabilitas ekonomi, sisi ketenagakerjaannya, sisi kehidupan kita bagaimana. Kebijakannya bagaimana, kondisi infratrukturnya, serta tenaga kerjanya. Nah disinilah faktor keterbukaan itu menjadi sangat penting untuk menarik investasi asing. Investasi asing ini yang kita perlukan dalam konteks supaya kita bisa membangun lebih banyak dari yang seharusnya kita bisa bangun sekarang.

Teks Farida Rosadi

Tahukah kamu?



Kas negara pernah kosong. Situasi ini melanda Indonesia di masa awal kemerdekaan.

Di awal kemerdekaan, Indonesia juga mengalami inflasi sangat tinggi. Hal ini merupakan akibat beredarnya lebih dari satu mata uang secara tak terkendali.

Tiga bulan pasca kemerdekaan, yakni November 1945, Belanda melakukan blokade ekonomi untuk menutup perdagangan luar negeri Indonesia.

Foto
KITLV

Foto
Agus Tri



UMi dan Ekonomi Mandiri

Tanpa disadari, keseharian kita seringkali bersinggungan dengan para pelaku usaha ultra mikro; pemilik warung sebelah rumah, penjual sayur-mayur di pagi hari, atau pedagang sosis bakar yang mangkal di depan sekolah anak. Mereka kerap menghadapi kesulitan untuk mengakses program pembiayaan dari perbankan. Pemerintah tidak tinggal diam serta berusaha memberikan fasilitasi usaha supaya mereka dapat lepas dari kemiskinan, salah satunya melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program ini merupakan tahap lanjutan dari bantuan sosial yang kemudian berubah menjadi kemandirian usaha. UMi menasar pelaku

usaha mikro di lapisan terbawah yang tidak *bankable*.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk pemerintah sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMi. Media Keuangan mendapat kesempatan berbincang seputar pembiayaan UMi dengan Djoko Hendratto, Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Berikut petikannya.

Mengapa fokus pembiayaan PIP menasar usaha ultra mikro?

Tatkala terjadi krisis 1998 dan 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) menyelamatkan ekonomi kita. Jika dilihat dalam struktur ekonomi di Indonesia, komponen *consumption* sektor UMKM memang mendominasi, bahkan menyumbang kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga saat ini masih demikian. Tak hanya itu, UMKM juga menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia.

Lantas, mengapa fokus kami ke ultra mikro? Setelah melihat data dalam rentang 2007 hingga 2016, dari sekitar 61 juta UMKM, ternyata hanya sekitar 17 juta saja UMKM yang dibiayai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekitar 44 juta sisanya tidak bisa mengakses KUR karena beberapa *provision* atau syarat-syarat yang ada di sana. Untuk tahun 2019 ini diproyeksikan angka tersebut sudah beranjak naik mencapai 58,91 juta.

Kebijakan KUR menggunakan bank sebagai penyalur. Puluhan juta unit tadi tidak bisa mengakses KUR, sebab salah satu *requirement* mendasar yang dibutuhkan adalah jaminan. Akhirnya, banyak yang menjadi mangsa rentenir. Ini menjadi keprihatinan pemerintah yang kemudian memunculkan pembiayaan ultra mikro berkonsep mudah dan cepat.

Berapa jumlah debitur UMi dan berapa banyak dana yang sudah disalurkan hingga kini?

Pada tahun 2017, total debitur UMi adalah 307.000 yang tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke. Capaian itu berhasil diraih hanya dalam 5 bulan. Selama puluhan tahun di dalam *financial sector*, saya belum pernah menemui pencapaian seperti itu. Memasuki 2018, jumlah debitur naik menjadi 800.000, dan pertengahan 2019 ini telah mencapai 933.000.

Kementerian Keuangan menyediakan dana untuk program UMi sebesar Rp7 triliun yang merupakan jumlah akumulatif sejak 2017. Hingga saat ini, total yang disalurkan sekitar Rp2,5 triliun. Kami

telah mengundang 3 lembaga untuk dijadikan penyalur utama. Kita minta komitmen mereka untuk meningkatkan target karena mereka sudah nyaman dengan target sebelumnya. Adapun untuk tahun ini, kami mematok target penyaluran Rp3 triliun.

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program UMi?

Masyarakat antusias sekali dengan program UMi sebab dirasa sangat membantu. Cukup banyak Pemda yang tertarik dengan UMi. Telah ada dua Pemda melakukan MoU dengan kami dan masih banyak Pemda lain yang berminat. Bahkan dunia internasional melalui OpenGov Recognition of Excellence 2019 memberikan pengakuan atas proyek digitalisasi pembiayaan UMi yang sedang kami uji cobakan.

Bagaimana progress penyaluran pembiayaan UMi melalui sistem digital?

Pemikiran penggunaan sistem digital diawali adanya tuntutan ketepatan sasaran dalam proses penyaluran. Masalahnya seringkali kami tidak bisa memantau bagaimana aliran dana sampai kepada *end user*. Pemantauan manual tidak mungkin bisa melakukan itu. Lalu, kami mendapat pelajaran dari OECD dan negara-negara lain bahwa untuk mengembangkan UMi ini kami perlu menggunakan teknologi informasi. Nah, itulah yang kemudian kami *create*, yaitu suatu sistem yang bisa memantau sampai ke debitur atau *end user*.

Kami bekerja sama dengan penyedia teknologi digital sebagai penyalur pembiayaan kepada mitra kerja PIP. Saat ini mitra kerja yang sedang kami uji cobakan adalah koperasi. Penyaluran dari PIP hingga koperasi nanti menggunakan *virtual account*. Selanjutnya, koperasi akan memberikan pinjaman kepada debiturnya melalui platform digital. Nah, debitur UMi ini nanti mendapatkan saldo pinjaman dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan ekosistem yang ada di Linkaja, T-Money, Bukalapak, Gopay, dan Dana. Debitur UMi juga sekaligus menjadi *merchant* dalam ekosistem tersebut. Nantinya, pengembalian pinjaman kepada koperasi juga bisa dilakukan melalui mekanisme yang sama. Poin utamanya yakni kami hanya ingin memantau dana itu sampai di sana. Jadi, aliran uang itu bisa terdeteksi.

Apa tantangan terbesar dalam penyaluran pembiayaan UMi?

Alhamdulillah kami berhasil melewati tantangan terbesar pertama, yaitu politik. Tantangan kita yang berikutnya adalah percepatan. Namun, ada pameo bahwa manakala kamu mengedepankan kecepatan, maka kamu akan meningkatkan risiko. Oleh karena itu, fokus kami berikutnya yakni bagaimana kemudian kami meng-*adjust*, mem-*balance*, dan men-*spread* percepatan itu. Kami melakukan sosialisasi, *join* dengan berbagai

Pembiayaan UMi diarahkan agar pelaku usaha ultra mikro bisa naik kelas

Foto Anas Nur Huda.



Djoko Hendratto, Plt. Direktur Pusat Investasi Pemerintah

Foto Resha Aditya Pratama

pihak, termasuk berkolaborasi dengan semua kementerian terkait. Nah, menariknya adalah, mungkin baru program ini yang terkolaborasi dengan hampir semua kementerian.

Tantangan lain yang kami hadapi yakni persepsi masyarakat bahwa pinjaman pemerintah itu sama dengan bantuan sosial dan tidak perlu dikembalikan. Ini yang harus dibenahi. Kami berusaha menekankan bahwa Pembiayaan UMi merupakan pinjaman pemerintah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB kemudian memberikan pinjaman kepada pelaku ultra mikro untuk kemudian dicatatkan siapa saja yang menerima pinjaman dari LKBB tersebut dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi. Pelaku ultra mikro yang tercatat dalam SIKP UMi itulah yang kami sebut sebagai debitur UMi. Tetapi, bukan berarti bahwa mereka menerima pinjaman langsung dari pemerintah dan tidak perlu mengembalikannya.

Apa rencana PIP ke depan untuk makin mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia?

For next, rencana kami yaitu bagaimana bukan hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga membuat penampungan dana masuk kembali dari para debitur UMi dalam bentuk tabungan. Ini dipicu oleh persoalan struktur *financial sector* di Indonesia. Jika diamati, sektor perbankan kita lebih banyak digunakan unit usaha besar. Bahkan Bank Indonesia menyatakan mereka tidak bisa memenuhi kewajiban 20 persen melakukan

pembiayaan ke UMKM. Artinya, terjadi kebocoran di dalam sektor UMKM kita. UMKM memproduksi dan menghasilkan, tetapi hasil usaha mereka justru masuk ke dalam sistem perbankan. Namun, dana perbankan tersebut bukannya kembali lagi ke UMKM, tetapi justru digunakan oleh unit usaha besar. Dengan demikian, sektor UMKM malah membiayai perusahaan-perusahaan besar.

Dalam konteks ini dapat dilihat telah terjadi kebocoran di dalam ekosistem UMKM. Seharusnya unit besar malah membiayai unit kecil. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Nah, dengan model membuat tabungan UMKM, kami berharap UMKM dapat membesarkan dirinya. Jika ingin mengembangkan UMKM menjadi makin besar, setidaknya dari sisi finansial mereka terus mendapatkan *accessibilities* dana.

Kami juga mencoba menggapai bank-bank internasional dan lembaga-lembaga internasional agar dapat melakukan investasi langsung ke UMKM. Mereka bisa mengamati sendiri, baik informasi maupun aliran dananya ke mana dan *return* ke mereka berapa. Dari langkah itu, kami berharap suatu saat nanti UMi bisa tidak lagi menggunakan APBN.

Jadi suatu saat nanti UMi tidak akan tergantung dengan APBN?

Oh iya, kalau itu pasti. Itu harapan kita, tapi kita masih melihat persoalan yang ada saat ini terlebih dahulu. Poin utama kami sekarang ini adalah mesin yang belum begitu besar. Kami masih harus meningkatkan kapasitas mesin kami. Dalam UMi, kami tidak hanya sekedar memberikan kemudahan dan kecepatan permodalan saja bagi usaha ultra mikro. Kami juga memberikan pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro melalui mitra kerja penyalur kami dan lembaga lain. Tanpa pelatihan dan pendampingan, usaha ultra mikro ini bisa berhenti berjalan.

Teks Reni Saptati D.I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Kartu Kredit Pemerintah

* Berdasarkan PMK-196/PMK.05/2018

Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat di bebaskan pada APBN

Tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah diantaranya meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara dan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi



Penggunaan kartu kredit pemerintah saat ini untuk pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan(UP)

UP terdiri dari UP Tunai 60% dan UP KKP 40%

UP Tunai di Brankas dan/atau Kas di Bank,

UP KKP di Rekening KUN

Belanja Apa Saja?

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk belanja pemerintah difokuskan pada keperluan belanja barang operasional serta belanja modal paling banyak Rp50 Juta yang merupakan bagian terbesar dari penggunaan Uang Persediaan.

Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal



Pemeliharaan Alat

Belanja Perjalanan Dinas

PANCO MEMBAWA HIKMAH

HANTRIONO JOKO SUSILO

Direktur Transformasi Proses Bisnis,
Direktorat Jenderal Pajak

Foto
Anas Nur Huda



Peristiwa 31 tahun lalu akan selalu lekat dalam ingatan Hantriono Joko Susilo. Hari itu rencana kehidupan yang ia cita-citakan sejak sekolah dasar berubah. Semua berawal dari suatu siang di sekolah saat ia duduk di kelas 3 SMA. Hantriono remaja bermain panco dengan temannya. Setelah mengalahkan temannya bermain panco dengan tangan kanan ia pun mencoba dengan tangan kirinya. Namun, ia lupa jika tangan kirinya pernah mengalami cedera retak akibat naik sepeda motor.

Tak ayal, ia kalah berpanco dan tangan kirinya patah. Sakit? Tentu saja. Namun ketakutan yang lebih besar merasuki dirinya. Dua minggu lagi ia akan mengikuti seleksi tes masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Dengan kondisi tangan kiri yang patah, tentu ia akan sulit mengikuti tes tersebut.

Hantriono kecil yang mengagumi ayahnya memiliki cita-cita mengikuti jejak beliau. “Bapak saya kan tentara, saya itu dari TK sampai SMP, karnaval itu jadi tentara. Jadi dulu karena saya ingin masuk AKABRI, saya jalanin olahraga. Wah namanya lari itu mungkin tiap hari saya lakukan semasa SMA dalam rangka persiapan untuk masuk AKABRI.”

Kebulatan tekadnya menggapai impian menunjukkan karakter Hantriono yang kuat. Namun sayang, cita-citanya harus pupus. Ia pun mengenang peristiwa tersebut sebagai momen keterpurukannya. Ia bingung harus berbuat apa sebab ia tidak memiliki rencana cadangan karena rencana utama dan satu-satunya dalam hidupnya adalah masuk AKABRI.

Namun, ia menyadari jika ia harus bangkit dari keterpurukannya. “Saya setahun itu tidak kuliah, luntang-lantung sementara teman-teman pada kuliah semua kan. Tapi saya masih merasa ada tanggung jawab. Sudah tidak bisa jadi ABRI, masa saya harus begini,” ceritanya.

Selama setahun ia pun kembali membaca buku-buku sekolahnya dan mengerjakan kembali soal-soal ujian. Ia berusaha memperkaya diri dengan ilmu secara

otodidak. Kegigihannya pun berbuah manis. Ia lulus tes Program Diploma 3 Penilai dan tes Akademi Penilik Kesehatan (APK). Ia pun memilih masuk Program Diploma 3 Penilai.

“Jadi semua ada hikmahnya. Mungkin kalau saya di AKABRI saya tidak akan sekolah S2 ke Denver. Jadi inti pembelajarannya adalah jangan putus asa. Jadi Allah itu akan memberikan apa yang terbaik buat kita hanya saja kita tidak mengerti seolah-olah itu musibah, padahal itu sebenarnya ujian buat kita untuk menjadi lebih baik lagi,” tuturnya.

Memang benar jika semua peristiwa kehidupan pasti ada hikmah positif dibalikinya. Jika saja saat itu, ia tidak bermain panco, lalu tangan kirinya tidak patah, mungkin saat ini dia tidak akan menduduki jabatan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis, Ditjen Pajak.

Mendorong Budaya Kerja Inovatif

Sepanjang karirnya, unit yang berkesan adalah unit Transformasi Proses Bisnis (TPB). Menurutnya, di unit ini pegawai memiliki ruang yang sangat besar untuk bisa berinovasi.

“TPB itu menurut saya unit yang luar biasa. Di sini kami dibebaskan untuk berinovasi. Kami bisa menuangkan ide untuk kemudian diimplementasikan,” ucapnya.

Nilai yang sama saat ini juga ia terapkan kepada para pegawainya. Ia berharap dengan adanya kebebasan tersebut akan muncul konsep dan ide yang lebih segar, memacu semangat pegawai dan juga mengeratkan sinergi antar subdirektorat.

Kemudahan bagi wajib pajak (WP) merupakan prioritas yang dipikirkan pria yang pernah mengenyam pendidikan di University of Denver, Amerika Serikat ini. Salah satu contoh konkrit adalah saat ia memikirkan bagaimana bisa memudahkan WP membayar SPT. “Dulu kita punya SPT Masa PPN dan e-faktur tapi kami ingin berinovasi lagi. Akhirnya kami mencoba untuk membuat bukti potong secara elektronik. Buat para WP itu luar biasa manfaatnya. Kalau dulu bikin bukti potong, lampiran dimasukkan satu persatu,” tuturnya.

Dengan adanya sistem bukti potong



Bersama keluarga

Foto Dok. Pribadi

elektronik, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan pajak, sistem ini juga bisa membantu fungsi pengawasan. Saat membuat bukti potong, secara otomatis sistem sudah merangkum seluruh bukti potong yang dibuat WP. Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi WP untuk menyimpan bukti potong dan hanya melaporkan sebagian saja seperti saat sistem manual.

Pria yang pernah menjadi Kabid PBB dan BPHTB, Kanwil Jakarta Timur ini juga terkenal saat Direktorat TPB diberi kepercayaan untuk membuat konsep peta proses bisnis. Setelah konsep berhasil disusun dan dipaparkan ke atasan, timnya mendapat kritikan dan masukan dari beberapa pihak. Namun demikian, kritikan dan masukan tersebut diterima sebagai pandangan yang konstruktif.

“Akhirnya kami perbaiki. Alhamdulillah kemudian itu menjadi salah satu pencapaian kami karena itu adalah peta proses bisnis pertama yang dimiliki Ditjen Pajak. Akhirnya peta proses bisnis itu di-*upgrade* ke level kementerian sehingga di level kementerian juga punya peta proses bisnis,” ujarnya.

Inovasi lain yang sedang dikerjakan yakni terlibat dalam program reformasi pajak

melalui persiapan implementasi Sistem Core Tax. Namun demikian, saat ini pengadaan sistem tersebut baru sampai tahap lelang. “Sambil menunggu itu, kami berinovasi dulu dengan melakukan *pilot project* untuk unifikasi SPT Masa yang tujuannya memudahkan WP melapor. Untuk tahap awal kami bekerja sama dengan Pertamina. Setelah dijalankan akan kami evaluasi dan jika lancar kami kerjakan bertahap hingga nantinya untuk seluruh Indonesia,” paparnya.

Berbakti pada Orang Tua adalah Kunci Kesuksesan

Berkarir selama 27 tahun, Hantriono Joko Susilo tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menduduki kursi Direktur Transformasi Proses Bisnis, Ditjen Pajak. “Tidak menyangka bisa jadi seperti sekarang karena memang dulu waktu kecil tidak ada cita-cita jadi direktur. Prinsip saya jika diberi amanah pekerjaan harus dikerjakan seoptimal mungkin dan jangan pernah menunda pekerjaan,” paparnya.

Pria yang hobi memancing ini selalu mengingat pesan ayahnya untuk selalu berdoa melakukan sesuatu. Dengan demikian, meski ia dihadapkan pada ujian kehidupan,

semua itu bisa dilaluinya dengan baik. “Le, pokoknya pesan Bapak iki yo, baca Al-Fatihah dan Shalawat Nabi tiga kali,” kisahnya menirukan kata-kata sang ayah. Pesan yang sama juga ia sampaikan kepada anak-anaknya terutama saat mereka menghadapi ujian.

Saat ditanya mengenai prinsip hidup, ia mengatakan orang tuanya menanamkan tiga hal yakni disiplin, jujur, dan jangan menyakiti orang lain. “Bapak *kan* tentara jadi disiplin yang utama. Kalau lihat absensi, mungkin bisa dilihat kalau saya tidak pernah telat. Kalau ibu saya selalu mengingatkan untuk jujur dalam bekerja dan berpesan “*Ojo ngelarani ati liyo*”. Maksudnya ga perlu menang-menangan di forum debat, *kan* ga bagus juga ya. Jadi saya pendekatannya jika tidak selesai di forum lebih baik bicara personal,” ucapnya.

Bagi Hantriono, rida dan doa orang tua itu luar biasa efeknya ke anak. “Jadi saya tidak pernah membantah, bahkan sampai sekarang saya setiap berangkat kantor atau dinas selalu pamit ke ibu melalui Whatsapp,” tuturnya.

Harapan

Saat ditanya tentang harapannya untuk institusi, ia berharap Ditjen Pajak dapat makin dipercaya oleh WP. Hal ini tentu saja akan berdampak positif terhadap penerimaan negara. “Bagi saya reformasi perpajakan itu sangat penting. Lima pilar yang menjadi haluan reformasi yakni organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, basis data dan regulasi harus diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, Ditjen Pajak dapat memenuhi harapan para *stakeholder* dan target penerimaan bisa tercapai.”

Sementara itu, untuk harapan pribadi ia mengatakan saat ini tidak memiliki ambisi dan tetap fokus untuk berkontribusi secara maksimal kepada institusi. “Kalau saya sekarang sedang mendapat amanah menjadi Direktur TPB itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga harapan dari pimpinan dan *stakeholder* bisa kami penuhi. Jadi intinya yang di depan mata ini kita selesaikan dulu sambil kami melihat ke depan. Untuk karir, saya jalani saja dulu,”

Teks Dara Haspramudilla

Kenaikan Rating, Daya Saing, dan Optimisme Ekonomi Nasional

Dwi Anggi Novianti,
Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Indonesia belum lama ini meraih dua capaian mengembirakan, yakni kenaikan rating (*rating upgrade*) dari lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor's (S&P) serta kenaikan ranking daya saing dari IMD World Competitiveness Center. Baik rating maupun peringkat daya saing selama ini menjadi salah satu acuan bagi investor domestik dan global untuk berinvestasi di suatu negara. Kenaikan rating dan kenaikan daya saing sama-sama merefleksikan iklim investasi di tanah air yang semakin membaik serta kondisi ekonomi yang sehat.

Rating adalah sebuah penilaian yang dilakukan oleh lembaga internasional dengan metode pengukuran tertentu untuk menilai risiko gagal bayar suatu entitas yang mengeluarkan surat berharga. Semakin baik rating, maka risiko gagal bayar dianggap semakin kecil. Artinya, semakin aman para investor untuk berinvestasi pada entitas tersebut. Entitas, termasuk negara, akan dinilai sebagai tempat layak investasi jika sudah menyanggah predikat *investment grade*, atau mendapat rating minimal BBB-/Baa3.

Sejak 2011, Indonesia telah meraih kembali *investment grade* yang sempat hilang dari genggamannya sejak dilanda

krisis moneter pada 1998/1999. Meski begitu, kita tentu ingin terus mencapai peringkat rating yang semakin tinggi, sehingga dapat menjaga serta memperkuat keyakinan investor untuk menginvestasikan dananya ke Indonesia. Selain itu, peringkat rating yang tinggi juga bermanfaat dalam penurunan biaya pinjaman (*cost of fund*).

Dengan kinerja dan stabilitas ekonomi yang terus terjaga, Indonesia kembali mendapatkan pengakuan. Beberapa lembaga rating ternama seperti Moody's, Fitch, ICRA dan R&I sejak 2017 hingga 2018 memberikan *upgrade* untuk Indonesia pada tingkat layak investasi yang lebih tinggi, yakni BBB/Baa2. Selanjutnya, menyusul diberikan rating *upgrade* dari S&P pada tingkat yang sama. Hal tersebut seolah menggenapi predikat layak investasi Indonesia yang semakin solid. Apalagi S&P selama ini dikenal sebagai lembaga pemeringkat kredit (*credit rating agency*) yang paling konservatif di antara yang lainnya.

Pada waktu yang hampir bersamaan, IMD World Competitiveness Center juga merilis peringkat daya saing negara-negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami perbaikan posisi daya saing paling signifikan (*top improvers*). Peringkat daya saing Indonesia naik hingga 11 peringkat, atau yang terbanyak di kawasan Asia. Dengan kenaikan tersebut, Indonesia menempati posisi 32 dari 43 negara, atau berada di atas beberapa negara berkembang lain seperti India, Filipina, Brazil, Turki, serta Afrika Selatan.



Ilustrasi Dimach Putra

Perbaikan pada tingkat rating dan daya saing Indonesia semestinya mampu meningkatkan minat dan kepercayaan investor kepada Indonesia.

Meskipun posisi Indonesia masih berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, akan tetapi melesatnya peringkat Indonesia menunjukkan perbaikan yang terus terjadi di berbagai aspek. IMD menggarisbawahi, perbaikan infrastruktur dan efisiensi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang mendukung naiknya peringkat daya saing Indonesia.

Lantas, apa manfaat yang dapat diambil Indonesia dari dua capaian tersebut? Tentunya, kedua capaian tersebut berdampak positif terhadap investasi dan aliran modal. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sangat membutuhkan investasi yang tinggi untuk menciptakan produktivitas di dalam negeri. Investasi dan aliran modal bukan hanya mesin bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga bermanfaat bagi pembukaan lapangan pekerjaan. Investasi, khususnya yang bersumber dari luar negeri, juga akan mendukung stabilitas sistem keuangan melalui suplai valuta asing. Dengan demikian, pergerakan nilai tukar Rupiah akan terjaga dari volatilitas yang terlalu tinggi.

Peluang di tengah gejolak ekonomi global

Capaian atas perbaikan peringkat layak investasi dan daya saing Indonesia menjadi angin segar di tengah perekonomian global yang tengah bergejolak, termasuk akibat isu perang dagang yang semakin sengit. Tantangan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat. Dengan kondisi tersebut, banyak otoritas moneter negara maju mengambil langkah-kebijakan untuk menjaga suku bunga acuan di tingkat yang rendah. Bahkan banyak yang memprediksi bahwa bank sentral negara adidaya Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga untuk memberi stimulus pada perekonomian yang mulai terkena imbas dari ketegangan dagang.

Sementara itu, otoritas moneter Eropa juga sudah mengambil langkah-kebijakan. Mereka mempersiapkan stimulus dalam bentuk *Quantitative Easing* di tengah suku bunga acuan yang masih di tingkat nol persen. Hal-hal tersebut semakin mengindikasikan prospek ekonomi global masih cukup sulit ke depan.

Dengan tetap berwaspada terhadap volatilitas global, Indonesia bisa mengambil peluang terhadap kondisi ini. Sebab besar kemungkinan, kebijakan suku bunga rendah masih akan

dipertahankan oleh negara-negara maju. Sebagaimana diketahui, aliran modal yang memasuki negara berkembang cenderung tinggi saat negara-negara maju mempertahankan suku bunga dengan tingkat yang rendah.

Perbaikan pada tingkat rating dan daya saing Indonesia semestinya mampu meningkatkan minat dan kepercayaan investor kepada Indonesia. Kita tentu berharap agar aliran modal yang masuk tidak sebatas pada modal yang bersifat jangka pendek atau *“hot money”* saja, melainkan juga jangka panjang. Dengan kondisi transaksi berjalan yang defisit, diharapkan investasi langsung seperti Penanaman Modal Asing (PMA) akan terus tumbuh, sehingga dapat menutupi defisit transaksi berjalan secara lebih berkesinambungan. PMA dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) juga harus diarahkan untuk mendukung industrialisasi dan ekspor, sehingga struktur ekonomi Indonesia bisa lebih kuat ke depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja investasi langsung, khususnya PMA, cenderung di bawah ekspektasi. Pada 2018, misalnya, PMA masih mencatatkan pertumbuhan negatif, yaitu minus 8,8 persen (yoy). Maklum, aktivitas investasi dunia memang turut terimbas di tengah kondisi global yang masih penuh

ketidakpastian, serta kondisi perdagangan global yang menurun.

Rendahnya tingkat permintaan global ini berimbas juga pada turunnya sektor manufaktur secara luas di banyak negara. Untuk di dalam negeri, proses Pemilihan Umum sedikit banyak juga berpengaruh kepada investor, sehingga bersikap hati-hati dan menunda keputusan investasi. Meski demikian, PMDN masih tumbuh sangat kuat dan menjadi penopang di kala investasi asing menurun. Ini merupakan perkembangan yang baik, serta menunjukkan meningkatnya peran pelaku usaha dalam negeri. Namun perlu diakui, Indonesia masih sangat membutuhkan investasi besar, baik yang bersumber dari dalam, maupun luar negeri.

Reformasi struktural dan perilaku positif masyarakat

Itu sebabnya, penting bagi Indonesia untuk terus menunjukkan perbaikan pada iklim investasi, serta membenahi berbagai isu struktural. Ini menjadi tugas yang membutuhkan konsistensi dan komitmen dari berbagai pihak. Agenda reformasi struktural harus terus diperkuat, terutama pada sejumlah area yang masih memberi hambatan pada daya saing.

Pemerataan pembangunan infrastruktur harus terus ditingkatkan. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia

juga perlu didorong agar dapat bersaing dan beradaptasi di era perubahan teknologi seperti sekarang. Selain itu, iklim ketenagakerjaan harus dibangun kondusif. Begitupun dengan praktik korupsi, harus dilawan bersama.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat langkah reformasi struktural. Salah satunya melalui penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2020 yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI pada Mei silam. Pada kerangka tersebut telah ditetapkan strategi untuk menjaga agar perekonomian nasional tetap kuat melalui dorongan investasi dan daya saing. Selanjutnya dalam jangka menengah,

kebijakan yang diambil akan terus berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat neraca perdagangan dan memperdalam sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan investasi. Reformasi institusi juga akan beriringan dengan upaya reformasi ekonomi untuk menciptakan pembangunan yang lebih menyeluruh atau inklusif.

Boleh jadi saat ini menjadi momentum yang baik untuk Indonesia agar bersama-sama memperkuat pembangunan ekonomi

nasional. Peranan masyarakat juga begitu krusial. Dalam *Executive Opinion Survey* yang menjadi bagian penilaian oleh IMD, diketahui bahwa salah satu daya tarik ekonomi Indonesia adalah *“open and positive attitudes”*. Maksudnya, sikap masyarakat Indonesia dinilai sangat terbuka dan positif. Faktanya, ini menjadi satu faktor penting dalam mendukung daya saing ekonomi nasional. Maka, kita perlu memelihara sikap tersebut, baik sebagai kekuatan ekonomi maupun bagian dari budaya arif Indonesia.

Ilustrasi
Dimach Putra

Bencana dan Urgensi Asuransi Kebencanaan

Joko Tri Haryanto,
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Beberapa bulan lampau, berita terendahnya ruas jalan tol Kertosono-Ngawi telah menyedot perhatian masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi ketika penulis membaca masifnya bencana banjir yang serentak melanda beberapa daerah di Pulau Jawa. Tercatat, banjir menggenangi sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Provinsi Jawa Timur, banjir terparah terjadi di Kabupaten Madiun yang menerjang 8 kecamatan dan 38 desa terdampak. Aliran banjir juga merusak 230 hektar lahan pertanian yang seyogianya siap panen serta merugikan 14.280 keluarga. Beberapa daerah dalam area Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pusat banjir terkonsentrasi di Klaten, Wonogiri dan Sukoharjo. Sementara di Provinsi DIY, korban banjir dapat dijumpai di Gunung Kidul sebanyak 4 kecamatan.

Mundur ke masa penghujung tahun 2018, bencana alam juga melanda nusantara. Aktivitas vulkanik Anak Gunung Krakatau telah menyebabkan munculnya tsunami Selat Sunda. Meski hanya sekejap, tsunami Selat Sunda memberikan dampak kerugian yang

luar biasa. Selain menelan korban jiwa, bencana tersebut meruntuhkan sendi-sendi ekonomi dan bisnis khususnya sektor properti, perhotelan dan pariwisata di sebagian Provinsi Lampung serta mayoritas wilayah di Provinsi Banten. Kawasan Wisata Tanjung Lesung tercatat sebagai salah satu daerah terdampak paling besar di sepanjang pesisir barat Provinsi Banten.

Dari hasil investigasi riset media, efek gelombang tsunami Selat Sunda menimbulkan kerugian pengelola kawasan wisata Tanjung Lesung hingga menyentuh angka Rp150 miliar. Dampak penutupan 500 kamar hotel juga menimbulkan efek kerugian lanjutan sampai dengan Rp180 miliar, belum termasuk rusaknya 236 infrastruktur vital gardu distribusi listrik PLN. Total *exposure* asuransi nasional yang dibayarkan oleh PT Reasuransi MAIPARK Indonesia ditaksir mencapai Rp307 triliun dari 17.843 jenis risiko.

Tak salah jika hantaman bencana tsunami Selat Sunda betul-betul memberikan dampak serius hingga beberapa periode ke depan. Terlebih jika dikaitkan dengan status Tanjung Lesung sebagai salah satu di antara 10 destinasi Bali Baru prioritas nasional. Total kebutuhan investasi di 10 destinasi baru prioritas nasional tersebut mencapai 20 miliar USD, dengan rincian berbeda di masing-masing lokasi. Untuk Tanjung Lesung saja diperkirakan membutuhkan investasi hingga 4.000 juta USD, dengan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019 mencapai 1 juta pengunjung dan menghasilkan devisa hingga 1.000 juta USD.

Badan Pengelola Dana Kebencanaan

Fakta-fakta yang dibebankan di atas jelas sangat memprihatinkan, khususnya

dikaitkan dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) pengelolaan dana bencana yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah. Oleh karena itu, hal paling mendesak untuk segera dilakukan saat ini adalah menciptakan skema asuransi kebencanaan di tanah air. Jangan lupa, dalam APBN 2019 pemerintah sudah membuka wacana untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan mitigasi risiko bencana. Gempa bumi dan tsunami Aceh Nias di tahun 2005 saja misalnya, menimbulkan kerugian tak kurang dari Rp42 triliun. Kerugian yang hampir sama juga terjadi pada waktu gempa bumi Provinsi DIY tahun 2006 dengan taksiran hingga Rp35 triliun. Belum lagi rentetan bencana yang terjadi berikutnya diantaranya gempa bumi Lombok serta gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala.

Langkah awal telah dicoba oleh pemerintah melakukan *piloting* skema asuransi barang milik negara (BMN), sembari secara paralel melakukan pengembangan kerangka pendanaan risiko bencana, skema transfer risiko sekaligus pembentukan mekanisme pendanaan khusus penanggulangan bencana alam di APBN. Hal terakhir inilah yang menggelitik untuk dibahas secara lebih mendalam serta layak dikaji secara akademik khususnya terkait pertimbangan *benefit* dan *cost* yang harus dikeluarkan pemerintah.

Bagaimana bentuk pengelolaan dana khusus penanggulangan bencana alam di dalam APBN secara teori dapat diwujudkan dalam banyak skema. Ada skema *on call fund*, ada juga pembentukan dana kontijensi. Namun, dari keseluruhan usulan, penulis justru yakin jawabannya adalah melalui pembentukan Badan Pengelola Dana Kebencanaan (BPDK). Sebagai bentuk lain dari Badan Layanan

Umum (BLU) yang dapat diciptakan pemerintah, BPDK ini nantinya mampu menghimpun dana pengelolaan bencana baik yang berasal dari APBN/APBD, swasta serta dana-dana internasional apapun jenisnya.

Dana yang dihimpun kemudian wajib dipupuk dan dikelola untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana, mulai dari hulu sampai hilir, apakah kegiatan mitigasi maupun pasca terjadinya bencana, serta pengadaan berbagai alat peringatan dini bencana yang kerap lalai di tahapan pengadaan barang dan jasa. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), BPDK ini nantinya dapat memasukkan unsur-unsur pegawai profesional dengan standar gaji yang *competitive* dan memuaskan, selain tetap memasukkan keterwakilan pemerintah di dalamnya. Dengan demikian, aspek profesionalitas kerja dan berorientasi kepada kinerja *output* akan menjadi hal yang utama.

Dengan keberadaan BPDK ini, ke depannya pemerintah seharusnya lebih mampu mengelola dana kebencanaan secara lebih optimal, sekaligus menyelenggarakan layanan manajemen bencana secara lebih tanggap dan antisipasif untuk berbagai jenis bencana. Ketika bangsa lebih tanggap dan antisipasif, maka dampak kerugian yang ditimbulkan juga akan lebih terminimalkan. Dengan latar belakang kondisi geografis yang berada di *ring of fire*, keberadaan BPDK sekiranya keniscayaan, cepat atau lambat akan segera terwujud di Indonesia.

**)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*





Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang

Pemberi Layanan di Garis Terdepan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh merupakan instansi vertikal yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan.

Wilayah kerja KPPN Banda Aceh meliputi Pemerintah Aceh, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Sabang. Sebagai salah satu instansi di Kementerian Keuangan yang membawahi banyak instansi vertikal, Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Banyak kendala yang harus dihadapi para punggawa perbendaharaan dalam melaksanakan tugas mereka. Jarak

dan letak geografis yang menantang merupakan dua dari sekian banyak diantaranya.

Beberapa pengguna layanan perbendaharaan harus menempuh perjalanan yang tak mudah hanya untuk menyerahkan surat perintah membayar (SPM) atau sekedar berkonsultasi dengan pegawai di KPPN. Khusus di wilayah kerja KPPN Banda Aceh, beberapa *stakeholders* harus menempuh perjalanan berjam-jam dan bahkan menyeberang laut. Belum lagi jika cuaca sedang buruk, urusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut harus tertunda hingga cuaca kembali bersahabat. Untuk

Sabang, Kota kecil di Pulau Weh ini kita kenal sebagai titik nol kilometer di ujung paling barat Indonesia. Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk hadir dalam segala segi kehidupan rakyatnya, KPPN Banda Aceh membuka layanan filial di ujung barat nusantara ini. Apa itu layanan filial?

itu, kantor ini merasa perlu memiliki perpanjangan tangan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di beberapa wilayah kerjanya.

Cikal bakal filial

Dalam komitmen optimalisasi layanan ke seluruh stakeholders tersebut, KPPN Banda Aceh telah membuka layanan filial di Sabang sejak 2009. Pertimbangannya saat itu adalah kendala yang harus dihadapi satuan kerja (Satker) di saat harus mengurus keperluannya di KPPN Banda Aceh. Untuk mencapai Banda Aceh, Satker dari Sabang ini harus menempuh perjalanan laut yang berkisar satu hingga

Kantor Layanan Filial KPPN Banda Aceh di Sabang

Herkwin, Kepala KPPN Banda Aceh saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kantor Layanan Filial Sabang

Satker di Sabang yang datang untuk berkonsultasi dengan petugas

Foto Resha Aditya P.



tiga jam tergantung jenis kapal yang mereka gunakan. "Belum lagi kalau sedang musim angin dan ombak sedang tinggi," tutur Herkwin, Kepala KPPN Banda Aceh.

Keterbatasan armada penyeberangan juga menghambat mobilisasi para Satker dari Sabang. Hal tersebut membuat mereka *kerapkali* harus menginap di Banda Aceh apabila keperluan mereka tidak rampung diurus dalam satu hari. Kendala-kendala tersebut yang semakin menguatkan alasan penting dibukanya layanan filial di kota paling barat Indonesia ini.

Untuk mendukung terlaksananya layanan filial, perlu dilandasi dasar-dasar hukum. Gayung bersambut, tak lama berselang dari peresmian layanan filial di Sabang, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dan Layanan Mobile Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Hingga kini, telah terbentuk layanan filial dari 15 (lima belas) KPPN Induk di 17 (tujuh belas) lokasi. "KPPN Filial Sabang ini merupakan cikal bakal layanan serupa di lokasi lain," ucap Herkwin, "Untuk KPPN Banda Aceh, selain di Sabang, juga membuka layanan filial di Sigi."

Dalam melayani para Satker, KPPN Banda Aceh menugaskan satu hingga dua pegawainya ke Sabang. Sistem penugasannya adalah bergantian tiap seminggu sekali. Di sana, pegawai dari kantor induk ini dibantu oleh satu pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNP) yang putra daerah asli Sabang.

Berbenah dan merekah

Sebuah kantor filial memiliki kapasitas sebagai *front office* dari kantor induknya, dalam hal ini KPPN Banda Aceh. Waktu pelayanan pun terbatas hanya 15 hari saja. Pria yang telah mengabdikan 21 tahun di Kementerian Keuangan ini lalu menambahkan, "Awalnya memang 15 hari kalender saja, tapi atas desakan kebutuhan Satker, kami eskalasi ke atas dan diputuskan bahwa pelayanan dapat dilaksanakan 15 hari kerja."

Pada awal pembentukan, layanan filial di Sabang diselenggarakan di sebuah rumah toko sederhana. Namun, sejak awal 2019 ini kantor filial ini menempati bangunan baru yang lebih layak. Sebuah rumah dinas milik Pemerintah Kota Sabang yang disulap menjadi sebuah kantor pelayanan bersahaja yang nyaman. "Fasilitas yang didapat dengan sistem pinjam-pakai ini menunjukkan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemkot Sabang," tambah bapak beranak dua ini.

Saat *Media Keuangan* berkunjung ke sana, pelayanan di Kantor Filial Sabang nampak cukup ramai. Para Satker tertib menunggu giliran mengurus keperluannya. Kami berbincang dengan beberapa Satker di sela waktu menunggu. Saat ditanya pendapat tentang keberadaan layanan filial di Sabang, mereka sepakat merasa sangat terbantu. Terutama dalam hal penghematan waktu dan biaya. "Paling kami hanya berharap waktu pelayanan yang ditambah hingga sebulan," ucap salah satu Satker dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sabang.

Menanggapi harapan para Satker, Herkwin meyakinkan bahwa pihaknya telah memastikan aspirasi tersebut telah tersampaikan lewat laporan berkala ke pusat. Sementara itu, sebagai penyelenggara layanan pemerintah di daerah, ia terus meyakinkan jajarannya untuk selalu menunjukkan dedikasi tertinggi dalam melaksanakan tugas. "Kami adalah punggawa keuangan negara yang bertugas di batas terluar NKRI harus terus mengawal APBN dalam membangun negeri dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa" tutupnya.

Teks Dimach Putra

Teduh Mengawal Integritas

Nur Achmad,
Auditor Madya pada Inspektorat Bidang Investigasi

Nur Achmad menandakan sebagian besar waktunya untuk memastikan integritas pegawai Kementerian Keuangan terjaga. Tak satu dua kali ia dan sejawat perlu mengadu nyali demi menjaga kebugaran keuangan Ibu Pertiwi.

Saat ini, ia menjabat sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Bidang Investigasi (IBI). Di awal karirnya, situasi birokrasi masih jauh lebih keruh dari hari ini. Salah satu cara negara hadir memberes lahan-lahan keruh adalah melalui auditor bidang investigasi. "Pada awal pembentukannya, investigasi dikedepankan," ia melanjutkan, "itu lagi seru-serunya banyak kasus." Tumpukan aduan banyak menanti dibereskan. Mulai perkara yang terbilang ringan sampai dengan pelanggaran pelik.

"Lima enam tahun terakhir, pencegahan lebih dikedepankan," kata Nur Ahmad.

Usaha pencegahan ini dilakukan melalui ragam edukasi dan sosialisasi. Dengan sosialisasi dan edukasi tanpa henti, diharapkan semangat bebersih birokrasi tertanam lebih dalam. "Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) juga kami lakukan. Kalau di Bea Cukai, juga ada *Spot Check*." *Spot Check* adalah prosedur pengawasan langsung oleh IBI dalam kegiatan pemeriksaan fisik barang di bidang kepabeanan. Prosedur ini bertujuan mendukung DJBC dalam mengawasi kesesuaian barang di dalam peti kemas dengan dokumen pemberitahuannya.

Selain upaya itu, IBI juga melakukan eksaminasi harta kekayaan dari laporan harta kekayaan pada Aplikasi Laporan Harta Kekayaan (Alpha). "Kami analisa, kira-kira harta teman-teman ini wajar atau tidak," ia melanjutkan, "Kalau punya rumah sampai lebih dari satu, mewah, mobilnya juga mewah, itu kita pantau dari mana dia dapat."

Mengintai Kejanggalan

Sebagai Auditor Investigasi, Nur Achmad tentu tak terhindar dari tugas pengintaian untuk memastikan bentuk dan modus pelanggaran yang terjadi. "Surveillance itu bisa macam-macam. Bisa

mengikuti seseorang, bisa mengamati suatu bangunan," ujarnya.

Tak satu dua kali Nur Achmad dan rekan-rekannya mengikuti beberapa kasus besar. Pada 2008, ia dan tim mengikuti salah satu kasus yang cukup ramai jadi perbincangan. "Itu seluruh personil IBI turun semua. Karena yang (perlu) diwawancarai (dimintai keterangan) ada puluhan orang di sana," ujarnya.

Beberapa tahun setelahnya, ia kembali mengikuti kasus suap yang terjadi di salah satu unit Kementerian Keuangan. Menurut keterangannya, "itu hampir seluruh pegawai menerima." Saat itu, investigasi dilakukan kepada seluruh pegawai di kantor itu. "Kami mulai melakukan pengumpulan bukti, terus bagaimana kasus itu bisa terjadi, bagaimana kok sampai ada aliran uang ke beberapa orang, secara teknis memungkinkan atau *nggak*. Kemudian, apa sih yang mereka lakukan atau mereka tidak lakukan sehingga bisa memperoleh uang yang tidak halal itu. Kami teliti," katanya mengisahkan kejadian saat itu.

"Tidak hanya di lingkungan itu saja. Kami juga lakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal," ia melanjutkan. Dalam kasus itu, IBI berkoordinasi dengan Kepolisian. Tak hanya Kepolisian, dalam berbagai kasus, IBI juga menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Nur Achmad mengatakan, IBI menjalin kerja sama juga dengan KPK, Kejaksaan, dan PPATK.

Terkait tugas pengintaian yang seringkali pelik, Nur Achmad perlu menuntaskan pendidikan dan pelatihan intelijen di Badan Intelijen Negara (BIN) di awal karirnya. Selain itu, auditor IBI juga dibekali dengan beberapa kompetensi khusus. Salah satunya adalah *offensive driving*. "Kami dibekali cara-cara *ngejar* orang, cara-cara menghindari," ujarnya. Kendati demikian, menurut Nur Achmad, kompetensi utama untuk menjadi auditor investigasi justru bukan hal semacam itu. "Menurut saya pribadi yang paling penting



Ilustrasi
Pengintaian

Nur Achmad,
Auditor Madya
IBI

Ilustrasi
Penyitaan
Ruang

Foto
Anas Nur Huda

adalah integritas," ia melanjutkan, "Bagaimana seseorang menyapu lantai yang kotor kalau sapunya tidak bersih?"

Selain integritas yang merupakan sebuah syarat wajib, menurut pria yang telah 15 tahun menjalani tugas sebagai auditor investigasi ini, kemampuan bekerja sama dan sikap teguh serta tidak mudah menyerah juga sangat penting untuk dimiliki. Hal ini penting, mengingat lingkup yang ditangani oleh IBI cukup luas. Mulai perkara kecil sampai perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Menggadai Nyali

Tugas bebersih kecurangan tak pernah jauh dari menggadai nyali. Pun beberapa situasi yang mesti dihadapi Nur Achmad sepanjang karirnya sebagai auditor investigasi. "Belum terlalu lama, di pelabuhan tikus (pelabuhan ilegal)," ia bercerita, "salah satu rekan junior sedang melakukan pengamatan, namun kemudian tepergok, (lantas) dikejar sama orang situ." Nur Achmad dan timnya lantas kabur menyelamatkan

diri. "Pokoknya bagaimana caranya agar lepas aja. Sampai jauh itu," katanya. Tak hanya ia yang mengalami kejadian semacam itu. "Rekan satu lagi pernah kena. Sampai dibawa ke hutan, dikepung begitu. Akhirnya minta tolong pusat untuk *ngelepasin*," kisahnya mengenang.

Pria kelahiran Kulonprogo ini berharap pemberantasan korupsi berjalan baik. Ia juga berharap generasi mendatang terus merawat integritasnya. "Jangan sampai ada coretan-coretan yang *nggak* baik untuk kementerian kita," ia melanjutkan, "Semoga orang semakin *nggak* mau melakukan korupsi, baik karena takut dihukum ataupun kesadaran dari dalam."

Teks A. Wirananda

Ruang Fleksibilitas LMAN dalam Program Strategis Nasional

Riviu PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Ilustrasi
Dimach Putra



Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan populasi tanpa diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai tidak akan bisa membuat ekonomi negara tumbuh secara optimal. Salah satu infrastruktur vital yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur transportasi, antara lain pembangunan jalan tol. Namun demikian, membangun infrastruktur membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam rangka mencapai target pembangunan infrastruktur, pemerintah memberikan dukungan dari APBN, baik dengan menggunakan dana talangan pengadaan tanah maupun pembayaran langsung, yang dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Penggunaan dana talangan ini menjadi solusi untuk mengatasi kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur.

Sebagai payung hukum, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (PMK Nomor 21/PMK.06/2017), yang telah diubah pertama kali dengan PMK Nomor 5/PMK.06/2019. Proyek

Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan skema yang dimiliki LMAN, pekerjaan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam PSN menjadi lebih cepat karena sebagian permasalahan mengenai dana untuk pembelian lahan dapat diatasi.

LMAN Tetapkan Status Tanah

Dalam PSN, Menteri Keuangan memiliki beberapa kewenangan antara lain memberikan persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan PSN. Dalam PMK Nomor 21/PMK.06/2017, penggunaan sementara aset hasil pengadaan tanah dimaksud diberikan kepada kementerian/ lembaga terkait di beberapa PSN seperti ruas jalan tol, bendungan, kereta api. LMAN memiliki fungsi sebagai *landfunding* untuk membiayai pengadaan tanah PSN dan atas aset yang telah dilakukan pembayaran oleh LMAN dapat digunakan oleh instansi-instansi yang membutuhkan.

Dalam rangka meningkatkan fleksibilitas, LMAN memiliki kewenangan bukan hanya persetujuan penggunaan sementara BMN, namun sekaligus memiliki kewenangan untuk melaksanakan optimalisasi aset-aset hasil pengadaan tanah. Dalam pasal 8 ayat 1 huruf e PMK Nomor 21/PMK.06/2017, LMAN berwenang memberikan persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan PSN. Dengan ditetapkannya

PMK Nomor 100/PMK.06/2019, yang merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 21/2017, maka ketentuan mengenai persetujuan penggunaan sementara yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf e dihapus dan diganti dengan penetapan status penggunaan BMN oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Diharapkan dengan adanya mekanisme penetapan status penggunaan BMN tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pencatatan aset-aset hasil pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan PSN oleh Kementerian/ Lembaga. Dicabutnya kewenangan persetujuan penggunaan sementara juga mencabut aturan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 PMK Nomor 21/PMK.06/2017 yang mengatur mengenai mekanisme penggunaan sementara aset hasil pengadaan tanah yang digunakan untuk pelaksanaan PSN oleh kementerian dan lembaga.

Sedangkan terhadap persetujuan penggunaan sementara yang telah terbit atas aset-aset hasil pengadaan tanah yang telah dibayarkan oleh LMAN dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 78A untuk selanjutnya dilakukan penetapan status penggunaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya perubahan mekanisme pengelolaan aset dari penggunaan sementara ke penetapan status penggunaan menambah aturan baru tentang usulan penetapan status penggunaan BMN. Dalam Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 diatur status penetapan status penggunaan aset pada kementerian atau lembaga dalam PSN. Penetapan status aset hasil pengadaan tanah kepada kementerian dan lembaga diajukan berdasarkan pada inisiatif LMAN,

usulan kementerian/ lembaga kepada LMAN, atau kebijakan Pengelola Barang.

Penggunaan Lintas Tahun

Aturan lain yang diubah dalam PMK Nomor 100/PMK.06/2019 adalah penggunaan dana lintas tahun anggaran oleh LMAN untuk pembelian tanah PSN. Dalam PMK Nomor 100/PMK.06/2019, ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 26A. Berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (2) pelaksanaan pengadaan tanah PSN dapat dilaksanakan menggunakan dana ganti rugi pengadaan tanah PSN pada LMAN secara lintas tahun anggaran. Dana ganti rugi pengadaan tanah pun dapat digunakan tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana sepanjang terdapat perubahan daftar prioritas pendanaan tanah bagi PSN.

Penutup

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.06/2019 mengakomodasi perkembangan kebutuhan pendanaan tanah bagi PSN atas penggunaan alokasi dana yang lebih fleksibel. Aturan ini merupakan salah satu terobosan di sektor pembiayaan pengadaan tanah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan akuisisi tanah dalam jumlah yang besar. Sebagai BLU yang bergerak dalam menalangi dana pengadaan infrastruktur, kewenangan LMAN yang fleksibel diperlukan agar proses pencairan dana LMAN dapat berjalan dengan cepat sehingga pembangunan infrastruktur PSN khususnya jalan tol menjadi lebih efisien tanpa mengabaikan tata kelola yang baik.

Teks Budi Sulistyono

Kerja Cerdas untuk Negeri

Ini adalah kali ketiga, Hafiz Budi Firmansyah gagal dalam seleksi beasiswa pendidikan. Namun menyerah bukan jadi pilihan baginya. Kegagalan tidak mampu memadamkan semangatnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Setelah melakukan perbaikan di sana-sini, Hafiz kembali mencoba peruntungannya. Atas usahanya, Hafiz dinyatakan lulus seleksi beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan bisa belajar hingga ke Benua Eropa.

Informatika merupakan bidang yang begitu dia minati. Maka tak heran, selepas menyelesaikan Pendidikan Sarjana Bidang Ilmu Komputer di Universitas Gadjah Mada, Hafiz bertekad mendalami bidang tersebut lebih jauh lagi. Tidak tanggung-tanggung, Prancis jadi negara tujuan studinya.

Hafiz menuturkan, akar keilmuan yang kuat di Prancis jadi daya tarik tersendiri. “(Apalagi), Prancis terkenal sebagai negara yang melahirkan banyak pemikir dan tokoh di bidang ilmu pengetahuan, seperti Blaise Pascal, Voltaire, serta Denis Diderot,” ungkapnya menyebutkan. Sesuai mimpinya, Hafiz melanjutkan studi master di bidang Informatika pada University of Paris, Prancis.

Bangun inklusi keuangan

Bekal ilmu yang diperoleh sepulang dari Prancis tidak dia siakan. Sepulang dari masa pendidikan, Hafiz membangun Angsur Fintech. Sebuah *start up* yang memberi kemudahan kepada para

mahasiswa untuk memperoleh akses angsuran secara syariah. Melalui layanan Angsur, mahasiswa bisa mencicil barang yang mereka beli melalui media *online* tanpa perlu menggunakan kartu kredit.

Dijelaskan Hafiz, Angsur diharapkan bisa ikut meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. “Angsur hadir sebagai alternatif solusi terhadap rendahnya inklusi dan literasi keuangan syariah, terutama di kalangan mahasiswa Indonesia,” tuturnya. Dia melanjutkan, dari 264 juta penduduk Indonesia, hanya 49 persen yang memiliki akses ke perbankan.

“(Maka), *fintech* menawarkan solusi untuk mengurangi populasi masyarakat yang masuk dalam kategori *unbanked* atau *underbanked*. Yaitu masyarakat yang belum tersentuh akses ke layanan dan produk perbankan,” katanya.

“Dengan *fintech* syariah dan digitalisasi, diharapkan inklusi dan literasi keuangan bisa meningkat. (Selanjutnya) akses terhadap produk layanan keuangan bisa lebih cepat,” paparnya.

Pada sisi lain Hafiz mengungkapkan, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar keempat di dunia, Indonesia tergolong berada di tingkat yang rendah untuk inklusi keuangan syariah. “Hanya sekitar 11,6 persen dari total penduduk,” sebutnya. Terlebih lagi, bila berbicara tentang *fintech* syariah, maka angkanya lebih kecil lagi.

Pada sisi inilah, Angsur Fintech mengambil peran. Layanan Angsur Fintech merujuk pada Fatwa Dewan Syariah MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Murabahah (Akad Jual-Beli). Keuntungan yang diperoleh dari layanan ini disalurkan 2,5 persennya untuk fakir miskin. Sementara denda keterlambatan yang ada seluruhnya diberikan untuk lembaga sosial.

Perlu inovasi

Diakui Hafiz, kebutuhan masyarakat terhadap teknologi saat ini, membuatnya termotivasi untuk ikut berkecimpung lebih jauh lagi. Dia menyadari, berbagai lini kehidupan saat ini tidak lepas dari teknologi. “Mulai dari bangun tidur, sampai kita tertidur kembali, kita akan selalu berinteraksi dengan produk teknologi,” tuturnya.

Hafiz juga menyebutkan, populasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 120 juta pengguna. “Dengan populasi tersebut, Indonesia menjadi pasar yang sangat besar bagi bisnis produk digital,” ungkapnya. Hal ini pula yang mendorong Hafiz untuk turut terlibat dalam ekosistem pengembangan produk digital. Hingga pada akhirnya, mampu menciptakan inovasi pada produk digital.

“Inovasi jadi kunci agar Indonesia bukan hanya sebagai target pasar, melainkan juga sebagai pemain dan tuan rumah di negerinya sendiri,” harapnya.

Tantangan dan peluang

Menuntut ilmu di negeri orang tentu butuh penyesuaian. Apalagi, bahasa yang digunakan merupakan bahasa asing. Agar tidak menjadi kendala, Hafiz mengikuti kursus Bahasa Prancis selama delapan



Hafiz Budi Firmansyah, salah satu awardee LPDP yang berkesempatan menimba ilmu di Prancis

Foto dok. Pribadi

bulan, saat masih di Indonesia. Namun, kendala bahasa masih dia alami, terutama pada masa-masa awal perkuliahan. Selain bahasa, cuaca ekstrem jadi tantangan saat dia perlu melakukan sejumlah aktivitas di luar ruangan. “(Utamanya) saat musim dingin dan musim panas,” katanya.

Diakui Hafiz, pilihannya terhadap Prancis sebagai negara tujuan studi bukan tanpa alasan. Selain sebagai pencetak lulusan terbaik, menurutnya, Prancis unggul dari segi kekayaan etnisnya. Maka wajar saja, sikap hormat dan toleransi tinggi terhadap perbedaan jadi keunggulan masyarakatnya.

“Siapa pun memiliki peluang yang sama besar untuk menjadi yang terbaik,” ujarnya. Sebab, setiap orang diperlakukan sederajat dan sama tinggi. Hafiz menceritakan, di lingkungan pendidikan, staf pengajar selalu menekankan sifat meritokratis. “Dengan kata lain, siapa pun yang unggul akan mendapatkan nilai yang terbaik begitu pun sebaliknya, tanpa

memandang etnis, gender dan dari mana mahasiswa tersebut berasal,” tambahnya.

Selama menjalani masa pendidikan, Hafiz juga terlibat aktif dalam mengembangkan jaringan profesional. “Saya juga mengikuti organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis (PPI Prancis). Kemudian, saya juga diberi kepercayaan untuk mengembangkan Sistem Informasi Lapor Diri WNI di KBRI Paris, Prancis untuk membantu WNI yang berdomisili di luar kota Paris,” sebutnya.

Ruang kontribusi

Hafiz menyadari, memiliki pendidikan tinggi tidak serta merta menjamin seseorang untuk memperoleh pekerjaan. “Namun, dengan pendidikan tinggi, kita memiliki pilihan karir yang lebih banyak dan bisa berkontribusi lebih untuk negara,” jelasnya. Salah satu yang menjadi konsennya adalah yang terkait dengan hilirisasi produk. Sebab menurutnya, hilirisasi produk atas hasil riset merupakan

salah satu kunci agar Indonesia menjadi negara berdaya saing.

“(Maka), universitas mengambil peran penting dalam menelurkan inovasi yang bisa berdampak langsung di masyarakat,” ungkapnya.

Kini di penghujung 2018, Hafiz kembali memperoleh kesempatan melanjutkan studi doktoralnya. Lagi-lagi, melalui beasiswa dari LPDP. Maka baginya, LPDP merupakan terobosan cemerlang dari pemerintah dalam membuka kesempatan seluasnya bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. “Terdapat lebih dari 16 ribu penerima beasiswa yang perlu dikelola dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, Hafiz juga berharap agar para alumni yang mencapai lebih dari tiga ribu orang bisa jadi potensi luar biasa bagi Indonesia. “Mereka perlu diperhatikan, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia,” tutupnya.

Teks Farida Rosadi

GEMPUR ROKOK ILEGAL

PELANGGARAN UNDANG-UNDANG CUKAI



ROKOK
PITA CUKAI
PALSU



ROKOK
PITA CUKAI
BERBEDA



ROKOK
PITA CUKAI
BEKAS



ROKOK POLOS
ATAU TANPA
PITA CUKAI

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT
ATAU HUBUNGI NOMOR **1500 225**



Diam-Diam Mematikan

dr. Rizki Dinar E.
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

Penyakit ini menjadi pembunuh nomor dua pada wanita di negara berkembang. Menurut laporan Globocan-International Agency for Research on Cancer tahun 2012, jumlah insiden kematian di Indonesia akibat penyakit ini mencapai 17 per 100.000 penduduk. Kanker serviks namanya. Penyebab utamanya masih belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa peneliti menyebutkan salah satu virus yang berperan dalam perkembangan kanker mulut rahim ini ialah *Human Papilloma Virus* (HPV).

Hampir tidak pernah ditunjukkan gejala berbahaya pada stadium awal. Beberapa wanita dengan kanker serviks bahkan tidak merasakan gejala sama sekali. Namun, kanker ini mulai memperlihatkan dampak saat sudah stadium lanjut. Itulah mengapa kanker ini sangat berbahaya lantaran diam-diam muncul, tetapi mematikan. Kurangnya pengetahuan serta belum adanya kesadaran diri untuk deteksi dini sering kali menyebabkan kanker serviks baru ditemukan pada stadium akhir. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para wanita yang telah menikah untuk melakukan

pemeriksaan sedini mungkin sebagai tindakan preventif. Perlu diketahui, kanker serviks dapat segera ditangani jika ditemukan pada stadium awal.

Umumnya kanker ini menyerang wanita yang telah aktif melakukan hubungan seksual. Karena itu, Kementerian Kesehatan mencanakan program deteksi dini kanker serviks pada wanita yang telah menikah atau aktif berhubungan seksual. Program tersebut dikenal dengan pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan medis tersebut aman, mudah, serta murah dibanding biaya perawatan kanker serviks pada stadium lanjut. Terlebih, sejumlah Dinas Kesehatan sudah membuat program pap smear ini sebagai salah satu program wajib dalam kegiatan tahunan Puskesmas.

Pap smear dilakukan hanya pada wanita yang telah menikah atau aktif berhubungan seksual sebab dilakukan dengan cara memasukkan sebuah alat ke dalam vagina. Adapun bagi wanita yang belum menikah atau belum aktif secara seksual, deteksi dini

kanker serviks dapat dilakukan melalui pemeriksaan IVA test.

Wanita yang akan melakukan pap smear setidaknya berusia minimal 21 tahun dan aktif secara seksual, atau pernah menikah sebelumnya dan bercerai, lalu menikah lagi (2x menikah). Untuk wanita usia 21-29 tahun disarankan melakukan pemeriksaan 3 tahun sekali, sedangkan usia 30-65 tahun, disarankan melakukan pemeriksaan 5 tahun sekali. Wanita dengan HIV/AIDS positif juga disarankan menjalani pap smear. Sementara itu, wanita yang telah melakukan histerektomi total (pengangkatan rahim dan leher rahim) harus berhenti melakukan pap smear dan tes HPV. Perlu diingat, sebaiknya 2 hari sebelum pap smear hindari memakai pembalut, berhubungan seksual, menggunakan alat kontrasepsi, dan *douching* vagina (menggunakan pembersih vagina dengan cairan yang bersifat asam). Dengan persiapan yang baik dan benar, hasil pemeriksaan menjadi lebih optimal.



Foto
Anas Nur Huda

Seorang gadis muda turun dari ojek daring. Setengah berlari, dia menuju ke arah halte Transjakarta. Ia berharap masih bisa mengejar Transjakarta arah Bundaran Senayan. Ya, pagi itu dia kesiang. Sesampainya di halte, para penumpang berdesakan mengantre. Sayangnya, bus Transjakarta yang diharapkan baru saja lewat. Sekarang ia perlu menunggu 10 menit dengan konsekuensi telat.

Sambil menunggu, pandangannya tertuju ke arah jalan. Ia melihat mobil pribadi lalu datang. Matanya terpaku pada sebuah mobil keluaran Eropa berwarna merah hati. Dia mendapati seorang wanita berusia 40 tahun di dalamnya. Tampaknya, sang wanita hendak menuju ke kantor. Membandingkan dengan keadaannya saat

ini, ia berujar dalam hati, "Ah, andai saja aku seperti dia. Membawa mobil pribadi. Tidak perlu mengejar bus. Tidak perlu mengantri berdesakan di halte."

Namun, kenyataan hidup memang tidak melulu seperti impian kita.

Sebuah mobil bertipe *hatchback* melaju kencang sampai akhirnya berhenti di persimpangan padat. Di balik kemudi, seorang wanita mengenakan blus *dusty pink* dan celana kulot hitam. Seperti biasa, rutinitas paginya adalah bangun pagi, bersiap ke kantor, memanaskan mobil, lalu keluar rumah dan menghadapi padatnya jalanan.

Sambil menunggu giliran jalan di persimpangan, ia berpaling ke kiri jendela. Matanya tertuju pada lapak bubur ayam, tak jauh dari halte Transjakarta. Tampak sepasang suami istri melayani

pelanggannya yang pagi itu sudah mengantre. Mereka melayani dengan ramah. Sesekali tertawa dan bercanda. Ia pun memandangi wajahnya yang memantul di kaca spion dalam. Sambil melihat refleksi diri dan membandingkan kondisinya saat ini, ia pun berkata dalam hati. "Ah, enak juga ya punya usaha sendiri. Bebas mau kerja jam berapa. Tidak perlu berangkat pagi dan pulang sore hari. Tidak tua di jalan," tuturnya pelan.

Namun, kenyataan hidup memang tidak melulu seperti impian kita.

Pukul 02.00 dini hari, seorang wanita paruh baya bergegas menyiapkan beberapa plastik untuk diisi kerupuk, kuah kaldu, daging ayam, seledri, cakwe dan sambal. Sementara itu, suaminya sedang menuang bubur nasi panas ke panci besar di gerobak. Selesai persiapan, mereka mendorong gerobak menuju lapak yang sudah delapan tahun lamanya disewa. Lokasinya strategis, terletak di pinggir jalan dan dekat dengan halte Transjakarta. Tak ayal, mereka memiliki banyak pelanggan.

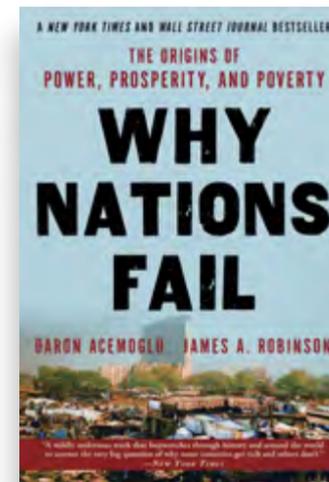
Sambil membantu suami melayani pembeli, ia melihat ke arah halte Transjakarta di mana beberapa orang yang akan berpakaian kerja sedang mengantre menunggu bus. "Ah, andai aku punya pekerjaan tetap. Setiap bulan pendapatan sudah pasti. Tidak seperti berjualan, kadang untung, kadang rugi. Kerja kantoran pasti enak, duduknya di ruangan ber-AC pula," keluhnya.

Namun, kenyataan hidup memang tidak melulu seperti impian kita.

Sadarkah kita jika seringkali merasa iri oleh kehidupan orang lain yang barangkali terlihat lebih nyaman dan lebih beruntung dari kita? Lantas, kita jadi tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Hingga kita lupa, bahwa mungkin saja ada orang lain yang juga iri melihat kenyamanan hidup yang kita miliki. Bahkan mungkin ingin memiliki kehidupan seperti kita saat ini. Maka, bersyukurlah.

Teks Dara Haspramudilla

Buku



Judul:
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty

Pengarang:
Daron Acemoglu dan James A. Robinson

Tahun Terbit:
2012

Dimensi:
546 Halaman

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda 1 Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat



Perpustakaan
Kemenkeu
Perpustakaan
Kementerian
Keuangan
@kemenkeuilb

www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 [Origin](#)
Dan Brown
- 2 [Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini](#)
Marchella F. P.
- 3 [The Magic Of Thinking Big](#)
David J. Schwartz
- 4 [Lean In](#)
Sheryl Sandberg
- 5 [The Alpha Girls Playbook](#)
Henry Manampiring

Why Nations Fail: Menelusuri Misteri Ketimpangan Antarnegara

Diawali dengan narasi soal kota kembar Nogales dimana satu sisi terletak di Meksiko sementara sisi lainnya di Amerika, buku ini menelusuri penyebab perbedaan kondisi ekonomi kota kembar tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, penulis membandingkan kesejahteraan orang Amerika dengan negara lain, seperti Meksiko, Peru dan negara-negara lain di Afrika. Perbedaan kondisi ekonomi yang mencolok antara Korea Utara dan Korea Selatan juga diangkat dalam buku ini.

Beragam pertanyaan mengemuka. Mengapa perbatasan dapat membuat perbedaan yang timpang? Mengapa ada negara-negara yang sangat kaya dan di saat yang sama ada negara-negara yang sangat miskin? Aspek apa saja yang mempengaruhi kesenjangan ekonomi antar negara tersebut?

Melalui buku ini, sang penulis berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama beberapa dekade coba dipecahkan oleh para ekonom, sejarawan, dan akademisi. Kedua profesor asal Boston dan Chicago tersebut menekankan jawaban pada skema institusi politik yang dianut. Inklusivitas politik merupakan elemen kunci keberhasilan suatu negara.

Negara yang maju dan kaya cenderung menganut skema lembaga politik inklusif yang memberikan

ruang untuk masyarakat lebih bebas berpolitik. Hal ini mendorong tumbuhnya seperangkat institusi ekonomi inklusif kuat yang akan memberikan insentif bagi masyarakat untuk berinovasi. Ini akan menjadi pondasi terciptanya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan.

Sebaliknya, negara bisa gagal dan miskin karena menggunakan skema institusi ekstraktif. Dalam skema ini, tidak semua orang bisa mengaksesnya dan hanya para elit dan oligarki yang bisa menikmatinya. Masyarakat yang miskin akan tetap miskin dan yang kaya akan semakin kaya.

Lalu mengapa masih ada negara yang mempertahankan skema institusi ekstraktif jika skema institusi inklusif adalah resep kemakmuran negara? Hal ini disebabkan para penguasa negara tersebut paham bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi akan memunculkan fenomena 'Creative Destruction'. Status quo tidak mau kepentingannya terganggu dan tergusur oleh ide-ide baru.

Buku ini menjadi perbincangan di Indonesia saat dirujuk oleh salah satu kandidat capres di debat pemilu. Isinya mudah dipahami sebab ditulis dengan bahasa sederhana. Bagi anda yang menyukai sejarah, fakta-fakta yang diangkat dalam buku ini sangat menarik untuk disimak dan tentu saja membuka perspektif baru.

Peresensi Hega Susilo

Sepi di Kebun Teh Gambung

Kadang, pelesir di Bandung terasa melelahkan alih-alih menenangkan.

Macet di mana-mana. Di Lembang, di pusat kota, meluber sampai Ciwidey. Apa yang biasa terjadi pada Jakarta di hari kerja pindah ke Bandung kala akhir pekan. Katanya, Bandung membawa ketenangan dan memori. Nyatanya, Bandung adalah lautan kendaraan, klakson, dan banyak cerita kesusahan menemukan parkir.

Kalau sudah begini, apa yang terasa? Masihkah ada tempat untuk menikmati sepi di Bandung Raya?

Saya mendapat sedikit jawabnya pada sebuah kebun teh di pertengahan jalan tembus antara Pasirjambu-Situ Cileunca. Kebun Teh Gambung namanya. Lengkapnya, Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Badan penelitian ini kini dikelola oleh PT Riset Perkebunan Nusantara, anak perusahaan PTPN I s.d. PTPN XIV.

Berbeda dengan kompleks Kertamanah-Malabar yang hari-hari ini

sibuk berkat lokasi syuting film *Pengabdian Setan*, Gambung tetap dengan sepiunya. Di sini, pengunjung bisa menikmati kebun teh khas Priangan Selatan yang paling otentik: perkebunan yang pernah merajai bursa teh dunia di zaman kolonial, dinaungi Gunung Tilu yang legendaris. Tanpa kehadiran keramaian yang mengganggu, lantaran belum banyak orang berkunjung kemari.

Kendati semua tempat wisata di Bandung kini berkonsep swafoto futuristik, ciri khas Gambung tidak berubah sejak ia pertama dibuka tanggal 1 Januari 1873: hijau yang basah. Sejauh mata memandang, permadani kebun teh mengikuti kontur pegunungan Priangan Selatan yang sama menakjubkannya. Cuaca Gambung terkenal cepat berubah; gerimis membuat suasana sendu dalam sepi. Berada di Gambung bagaikan menyerahkan diri pada alam. Pada mendung yang menebal, basahnya pucuk-pucuk teh, dan kontur tanah yang ekstrem di beberapa tempat.

Namun, Gambung tidak hanya kaya akan pemandangan dan suasana yang

menyihir. Ia padat akan cerita. Gambung dikenal sebagai perkebunan rintisan Rudolf E. Kerkhoven (1848-1918), sang administrator yang di masa lalu beroleh hak konsesi atas Gambung. Nantinya, ia mengembangkan kebun sampai sejauh Malabar, Negla, dan Talun, menjadikan Priangan Selatan pusat produksi teh terbesar di Jawa. Perjuangannya akan Gambung melegenda; ia diabadikan dalam roman sejarah bertajuk *Sang Juragan Teh* karangan Hella S. Haasse.

Berada di Gambung berarti menyaksikan segala ketekunan Rudolf, mulai dari jatuh bangun dan berbagai masalah yang ia hadapi saat mendapatkan konsesi Gambung, gegar budaya dengan masyarakat lokal, persaingan bisnis dengan keluarga sendiri, pernikahan dan pengalamannya sebagai ayah, sampai pada kejadian-kejadian yang mengubah hidupnya.

Namun, kecintaannya akan tanah Gambung tetap tumbuh sampai akhir hidupnya. Ia dan sang istri dimakamkan di

kompleks kebun teh ini.

Kini, Gambung mulai sadar bahwa dirinya adalah alternatif bagi wisatawan yang penat dengan kemacetan Bandung. Agrowisata mulai dikembangkan. Selain jalan-jalan di kebun teh yang lengang, pengunjung dapat ikut tur pabrik, menyaksikan pengolahan teh Gambung berlangsung dengan cara yang tak jauh beda dari warisan keluarga Kerkhoven. Wisma tamu disediakan bagi pengunjung yang hendak menghabiskan malam-malam dingin.

Pengunjung yang menyukai sejarah Gambung dan *Preanger Planters* akan menikmati napak tilas Rudolf Kerkhoven, dipandu paragraf-paragraf dari novel. Sebagai buah tangan, teh-teh hasil produksi Pabrik Gambung dapat dibeli dengan harga yang sangat terjangkau.

Teks Anggara Pradnya Widhiantara, Setjen



Pemandangan Kebun Teh Gambung

Foto Anas Nur Huda

Tips 'Jempol' Debitur 'Pinjol'



Ilustrasi Dimach Putra

Untuk urusan pinjam meminjam, sebagian besar masyarakat sudah mafhum, khususnya pinjaman era digital saat ini berupa pinjaman online atau sering disingkat 'pinjol'.

Banyak cerita yang mengungkapkan sulitnya meminjamkan uang kepada para debitur. Singkat cerita, karena pola kebiasaan yang seperti itu, para kreditur menjadi kurang bergairah untuk memberikan pinjaman dengan alasan uangnya berisiko tidak kembali.

Lain cerita di era digital, melalui perusahaan-perusahaan teknologi keuangan (*fintech*), ternyata banyak institusi dan orang kaya yang masih berminat memberikan pinjaman. Tentu saja dengan harapan imbal hasil yang sepadan. Lalu, kenapa banyak orang yang berminat menjadi debitur pinjol? Jawaban singkat, 'mudah dan cepat'.

Apa yang harus diperhatikan sebelum mengajukan pinjol?

Yang pertama adalah biaya pinjol. Biaya yang dimaksud sudah tentu berupa

bunga, di mana besar bunga pinjol mencapai 20 persen per tahun. Pihak *fintech* menyebutkan bahwa tingginya bunga karena melibatkan investor dalam kapasitas pemberi pinjaman. Mereka menginginkan imbal hasil tinggi melebihi bunga Bank. Kecepatan pencairan dan tingkat risiko juga dianggap mempengaruhi bunga tersebut. Belum lagi perusahaan *fintech* pasti mengambil *management fee* untuk biaya operasional mereka.

Masyarakat luas harus sadar bahwa biaya pinjol tidaklah murah. Segala tindakan memiliki konsekuensinya, termasuk meminjam uang. Apabila Anda terjebak, itu akan berbahaya. Saya hanya mengingatkan agar jangan pernah iseng menggunakan pinjol sebagai sarana pembiayaan untuk membeli *smartphone*. Selain depresiasi barang, Anda harus membayar pula bunga yang tinggi. Akhirnya, justru Anda rugi dua kali!

Yang kedua, jangan beli barang depresiasi tinggi. Membeli barang dengan tingkat depresiasi tinggi membuat Anda rugi berulang kali. Misalnya, Jenny ingin membeli *smartphone* seharga Rp10 juta,

dan ia mengajukan aplikasi pinjol. Dia mendapat utang sebesar Rp10 juta dengan bunga 20 persen setahun. Katakanlah depresiasi *smartphone* 20 persen per tahun. Lalu, berapa kerugiannya? Dari sisi depresiasi, harga *smartphone* turun 20 persen menjadi hanya Rp8 juta. Sementara dari sisi uang yang keluar, berarti Rp10 juta pinjaman ditambah bunganya menjadi Rp12 juta. Total kerugiannya menjadi Rp4 juta (Rp12 juta dikurang Rp8 juta).

Terakhir, bayarlah utang Anda. Jangan pernah mengira karena begitu mudah meminjam kemudian Anda bisa seenaknya membawa lari uang pinjaman tanpa membayarnya. Meski *debt collector* sudah tidak boleh digunakan, beberapa waktu lalu masih ada perusahaan yang bekerja sama dengan mereka untuk menagih utang. Artinya, Anda akan berhadapan dengan banyak konsekuensi ketika memutuskan meminjam uang.

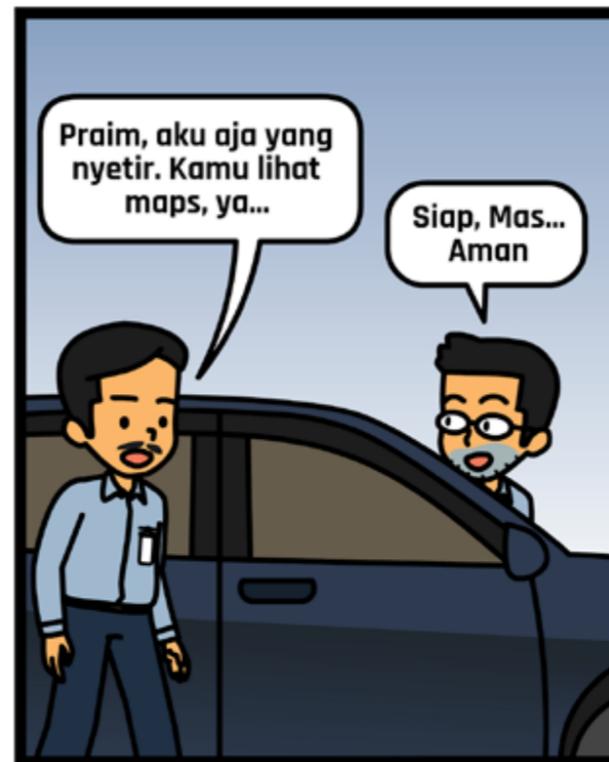
Andhika Diskartes, Perencana Keuangan, founder *diskartes.com*, dan penulis buku *Investory* dan buku *Investory "X"*.

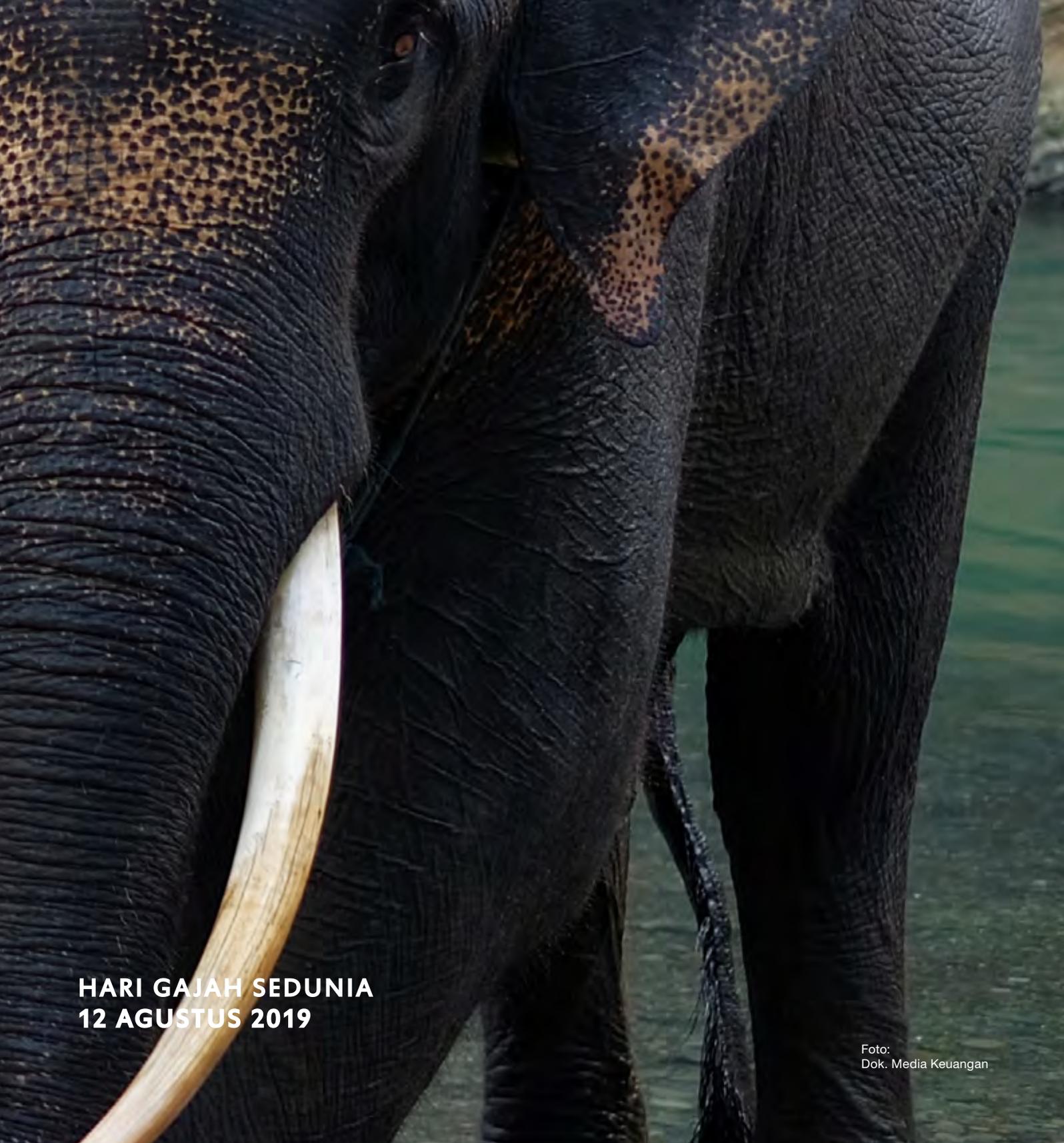
Mas Praim



"PERJALANAN DINAS"

Cerita : Dimach Putra Gambar : Bimo Adi





**HARI GAJAH SEDUNIA
12 AGUSTUS 2019**

Foto:
Dok. Media Keuangan



**SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU**



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**